



LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH

(LAKIP)
TA. 2023

SEKRETARIAT DPRD

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)

TA. 2023



BAGIAN PERENCANAAN

**SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TA. 2023**



*Sekretariat DPRD
Tahun Anggaran 2023*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Tahun 2023 (LAKIP Sekretariat DPRD 2023)" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya dalam kaitan terselenggaranya *good governance* dan *clean government*.

LAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2023 menyajikan informasi tentang pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam merealisasikan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023. LAKIP ini menjelaskan tentang pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan dari berbagai sumber anggaran baik APBD Kabupaten Luwu Timur, yang memiliki kaitan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD serta berdampak nyata terhadap pencapaian target indikator kinerja Kunci (IKK). Di samping itu, dalam LAKIP ini juga menguraikan tentang keselarasan antara pencapaian sasaran Renstra Sekretariat DPRD dan sasaran Rencana Kinerja Tahunan 2023 dengan sasaran kinerja utama RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026.

LAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik makro maupun mikro serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di bidang kelautan dan perikanan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang program dan kegiatan yang diselenggarakan serta sasaran yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur. Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran dan *stakeholder*



terkait lainnya, kondisi ini merupakan modal dasar yang sangat penting dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pembangunan Sekretariat DPRD di Kabupaten Luwu Timur sehingga bisa lebih maju dan lebih unggul, ditengah-tengah semakin tingginya tantangan dan permasalahan, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat, khususnya kepada Tim Penyusun LAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2023, yang telah berupaya bekerja keras dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas yang diamanahkan sehingga LAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Kami menyadari LAKIP ini masih mengandung sisi kelemahan dan kekurangan, sehingga dengan hati terbuka dan ikhlas, kami senantiasa menyambut baik atas segala bentuk kritik positif serta saran konstruktif dari semua pihak dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan penyusunan LAKIP pada masa mendatang. Akhir kata, dengan mengharap ridho dan pertolongan Allah SWT, semoga LAKIP Sekretariat DPRD ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pembangunan disegala bidang.

Malili, 02 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD



A. SWASTIKA S.Pi.M.sI

Pkt. Pembina Tk I

Nip. 197603162008031001



RINGKASAN EKSEKUTIF

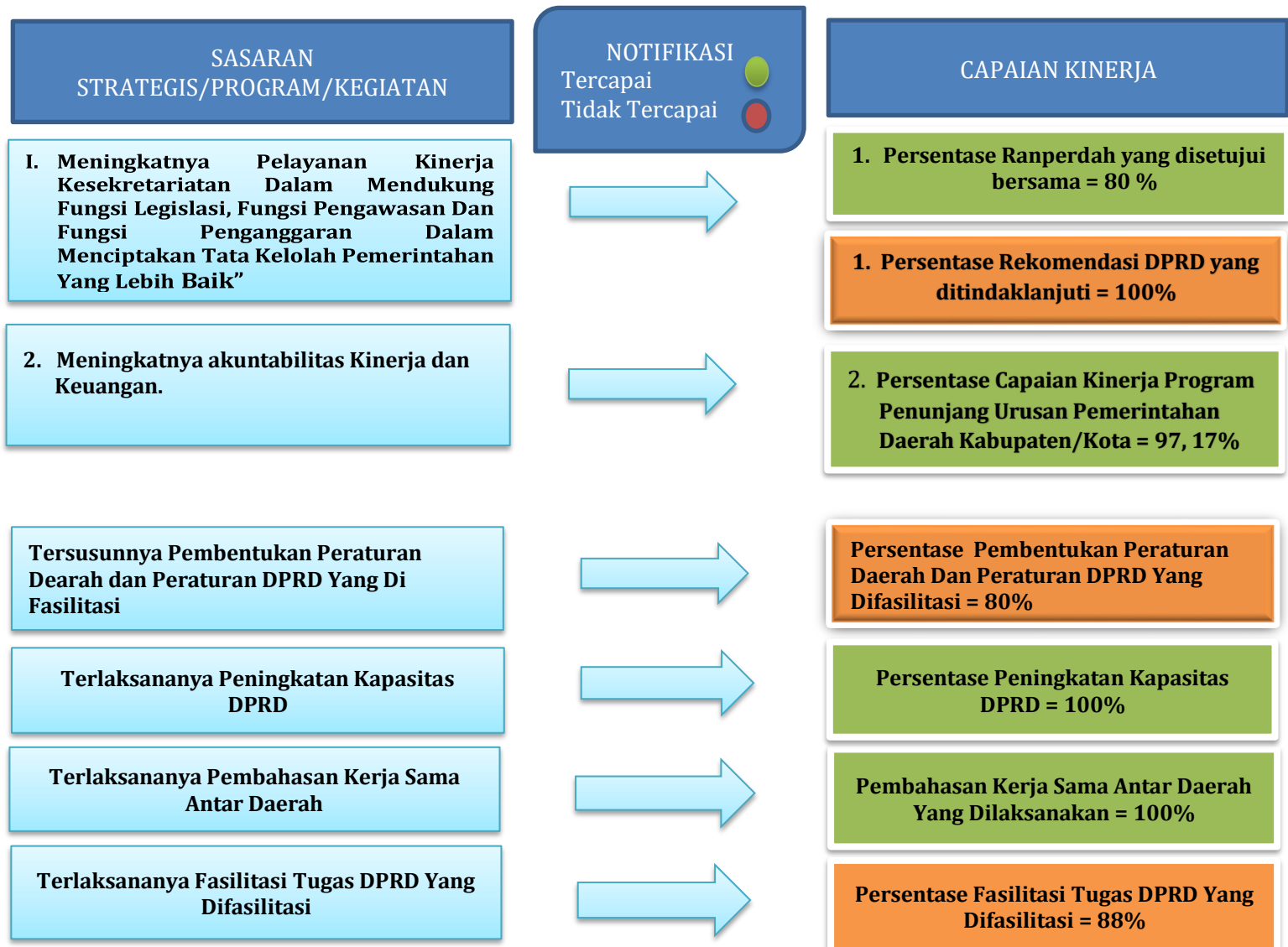
VISI

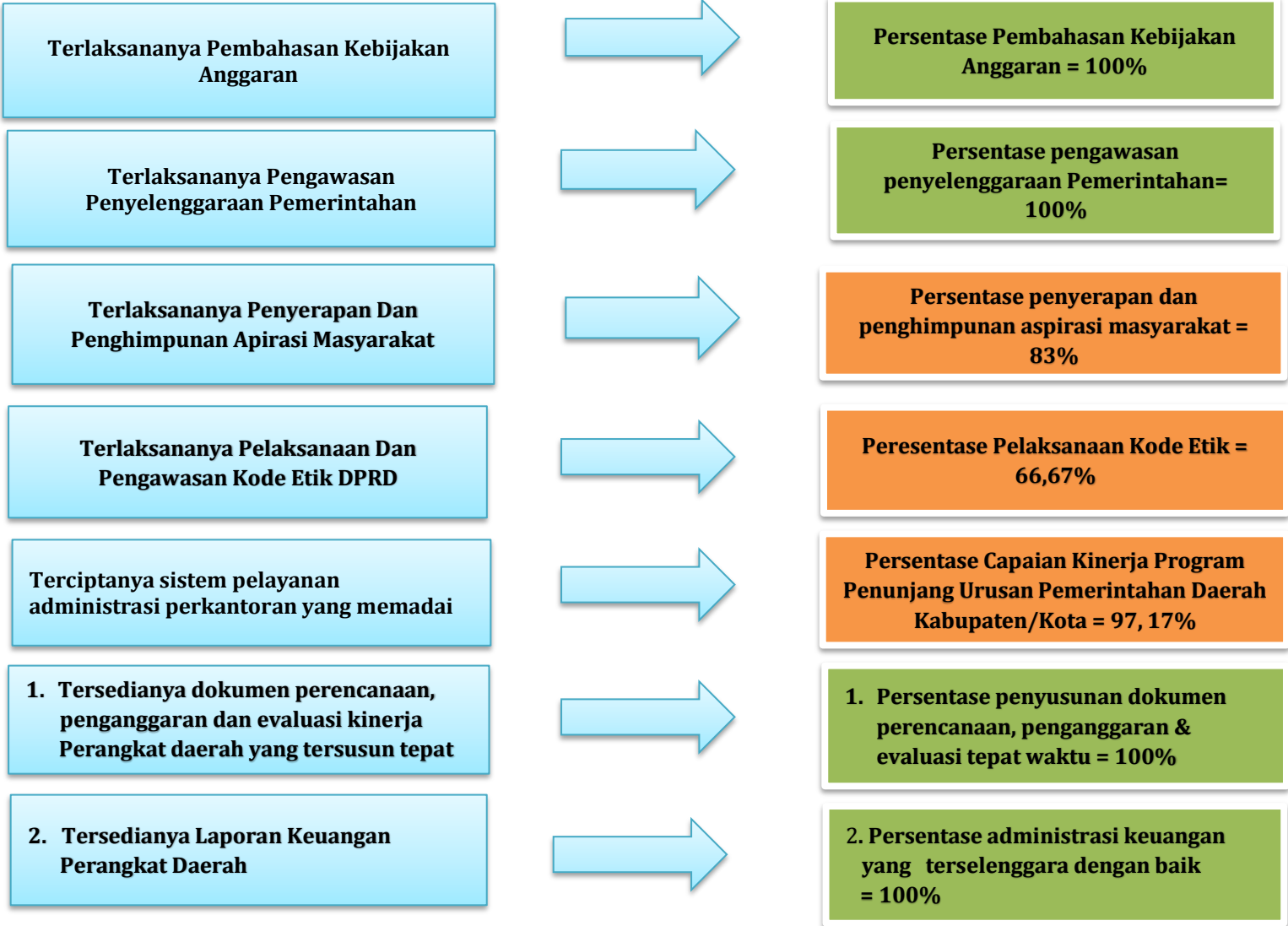
“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

• MISI

MISI Ke - 4 RPJMD

Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik





DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar	x
Daftar Diagram.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Maksud, Tujuan dan Manfaat.....	2
1. Maksud.....	2
2. Tujuan.....	2
3. Manfaat.....	2
I.3 Gambaran Umum Daerah	3
1. Luas dan Batas Wilayah Geografis.....	3
2. Gambaran Umum Sekretariat DPRD.....	4
I.4 Peran Organisasi.....	7
I.5 Isu Strategis.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
II.1 Perencanaan Strategis.....	10
1. Visi dan Misi.....	11
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	11
3. Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023 (IKU RPJMD).....	12
II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
III.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	17
III.2 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023	19
1. Capaian Kinerja Daerah (Indikator Kinerja Utama RPJMD).....	20
2. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	21
3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun-Tahun	24
4. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Sebelumnya.....	24
5. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Untuk Indikator Ke 2	25
6. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya...27	27
7. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 Dengan Renstra.....	27
III.3 Analisa Penyebab Peningkatan dan Penurunan kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	28
1. Analis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	29
2. Analisa Program /Kegiatan/Sub Kegiatan yang Capaian kinerja	31
3. Analisa Program /Kegiatan/Sub Kegiatan yang Capaian kinerja.....	48
III.4 Sasaran 2 dan Indikator	48
1. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	48



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2023

2. Perbandingan anantara target dan realisasi dengan tahun tahun sebelumnya.....	52
2. Perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini.....	53
3. Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	53
4. Realisasi.....	80
5. Analisa Penyebab Peningkatan dan Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan.....	80
6. Lanjut Hasil Rekomendasi Perbaikan- Perbaikan Perbaikan.....	82
TUP	83
IV.1 Kesimpulan	83
IV. 2 Saran	84
Lampiran	65



DAFTAR TABEL

Tabel .1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026	14
Tabel .2.	Perjanjian Kinerja Perubahan	15
Tabel .3.	Program dan Pagu Anggaran Perubahan 2023.....	16
Tabel .4.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	18
Tabel .5.	Pengukuran Capaian Kinerja.....	19
Tabel .6	Target Realisasi Kinerja Sasaran II.....	20
Tabel .7.	Ranperda Yang di Tetapkan	22
Tabel .8.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Fasilitas Ranperda.....	24
Tabel .9.	Perbandingan Realisasi dengan Target Resstra Tahun 2024-2025.....	25
Tabel .10.	Perbandingan Antar Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	26
Tabel .11.	Perbandingan Antar Realisasi Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi DPRD Yang ditindaklanjuti.....	27
Tabel.12.	Perbandingan Antar Realisasi Dengan Target Renstra	
Tabel.13.	Sarana dan Prasarana Kerja Utama	28
Tabel.14.	Capaian Kinerja Dan Anggaran.....	28
Tabel.15.	Efisiensi Sumber Daya.....	29
Tabel.16.	Kerjasama anatar Daerah Pihak Ketiga Urusan Pemerintahan Yang dilaksanakan sampai tahun 2023	40
Tabel 17.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran II.....	48
Tabel 18.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	51
Tabel 19.	Efisiensi Sumber Daya	52
Tabel 20	Perbandingan Target & Realisasi Dengan Tahun-Tahun sebelumnya.....	52



Tabel 21	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Jangka Menengah 2021-2026	54
Tabel 22	Capaian Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	54
Tabel 23	Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD 2023.....	69
Tabel 24	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023.....	70
Tabel 25	Permasalahan dan Solusi	74
Tabel 26	Matriks Tindak Lanjut Evaluasi Lakip Tahun 2022	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur.....	3
Gambar 1.2. Bagan Struktur Sekretariat DPRD.....	6
Gambar 1.3. PPID.....	8
Gambar 1.4. Croscutting Set DPRD	47



DAFTAR DIAGRAM

Diagram .1. Persentase Serapan Anggaran Tahun 2023 70



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	4
Grafik 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	5
Grafik 3. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023.....	20
Grafik 4. Target Dan Realisasi Ranperda	20
Grafik 5. Realisasi Capaian Kinerja Indikator Fasilitasi Ranperda	25
Grafik 6. Realisasi Capaian Kinerja Indikator Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	27
Grafik 7. Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58
Grafik 8. Realisasi Anggaran Tahun 2023	70



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja
Sekretariat DPRD Tahun 2023
- Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan



1

BAB 1 PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten /kota. Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maka Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur memiliki kewajiban untuk membuat dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Luwu Timur. Berdasarkan Peraturan tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi :
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan admistrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;



5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

1. Maksud

Maksud penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Sekretariat DPRD atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja daerah yang sudah diperjanjikan.

2. Tujuan

Bahwa tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai media laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan;
- 2) Sebagai media evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan, perwujudan tujuan dan pencapaian sasaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
- 3) Sebagai salah satu rujukan untuk perencanaan program dan kegiatan serta pengambilan keputusan (decision making);
- 4) Sebagai tolok ukur untuk meningkatkan kualitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan dimasa yang akan datang.

3. Manfaat

Manfaat penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah :

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Bahan masukan bagi penyempurnaan dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja pada periode yang akan datang;
- c. Bahan penyempurnaan pengelolaan program dan kegiatan pada periode berikutnya; dan
- d. Bahan masukan dan pertimbangan pengambilan kebijakan.



1.3 GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Luas dan Batas Wilayah Geografis

Kabupaten Luwu Timur memiliki luas wilayah 6.994,88 km² atau 11,14% luas Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari 11 kecamatan dan terdapat 127 Desa/Kelurahan. Secara geografis Kabupaten Luwu Timur berada di sebelah Selatan garis khatulistiwa, tepatnya terletak diantara 2°03'00" - 3°03'25" LS dan 119°28'56" - 121°47'27" BT. Sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara.

Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 km² atau sekitar 11,14 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur



Kabupaten Luwu Timur secara administratif terdiri dari 11 kecamatan, 124 Desa dan 3 Kelurahan. Wilayah kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana, dan Kalaena. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Towuti yang mencapai 1.820,48 km² atau sekitar 26,21 persen dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Malili merupakan Ibukota Kabupaten Luwu Timur terletak ±550 km sebelah Utara kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat dicapai dengan perjalanan darat (±12 jam) ataupun udara melalui bandara Sorowako ±45 menit dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassa



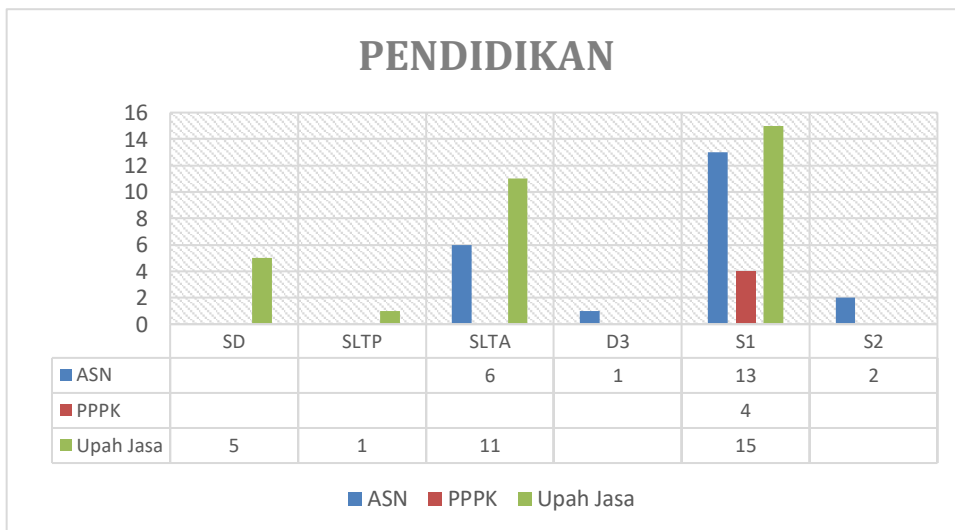
12. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Luwu Timur di bentukmelalui Peraturan Daerah Nomor 38 tahun 2018 Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

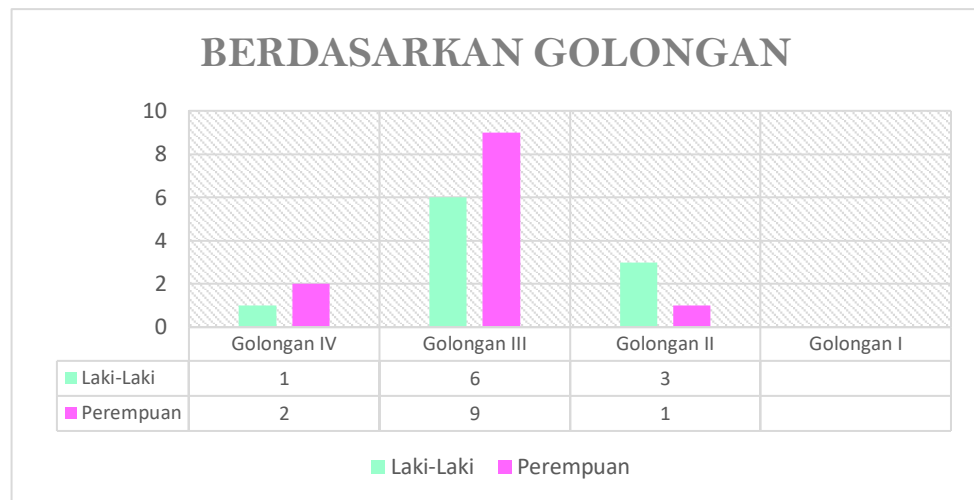
Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 58 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 22 orang dan Tenaga Upah Jasa 36 orang (Tenaga Administrasi 10 orang, Cleaning Service 21 orang, Sopir 5 orang). Struktur tingkat pendidikan SDM Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :

Grafik. 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

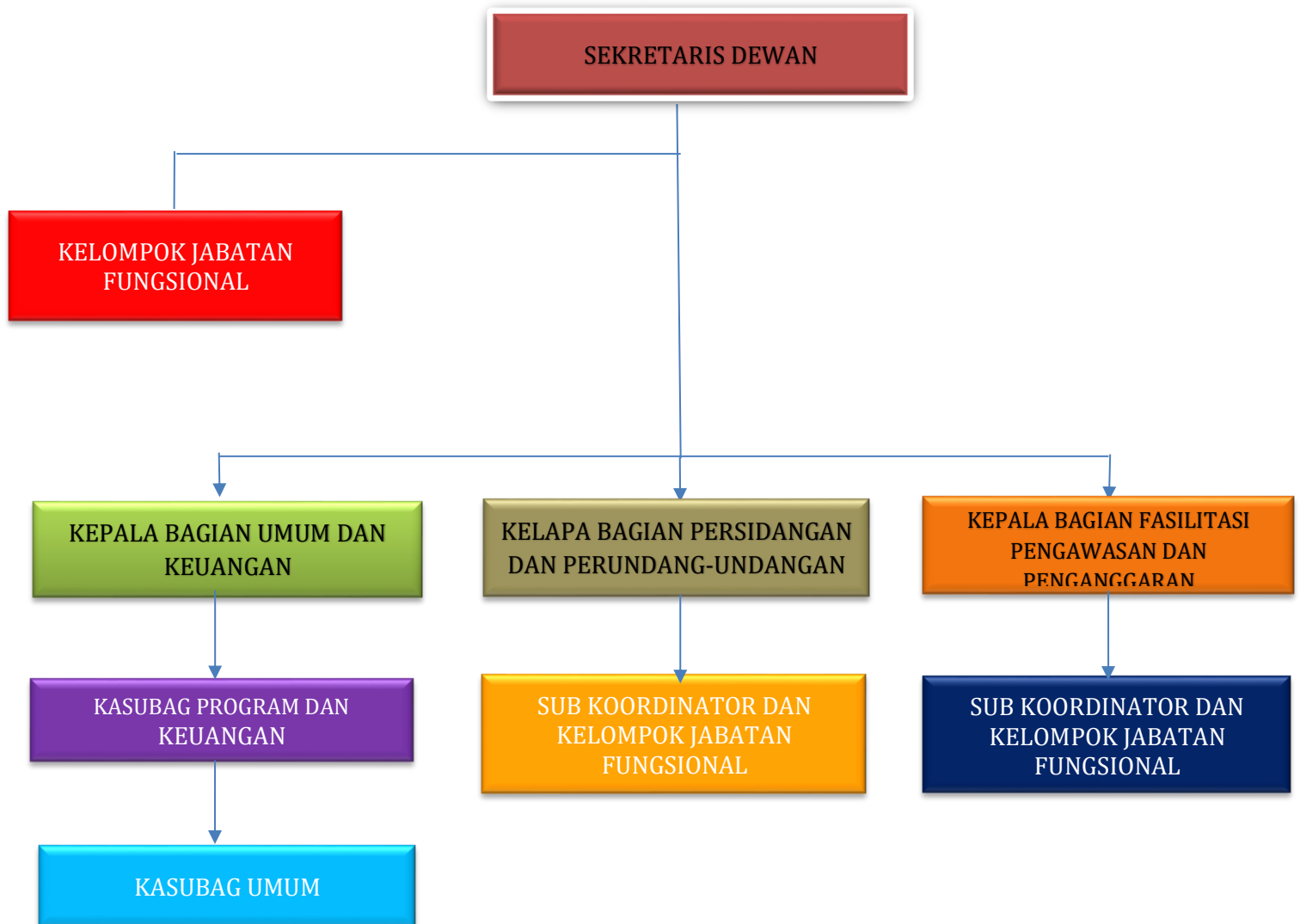


Grafik. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023



Gambar 1.2

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023



1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta



menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

1.4 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni untuk memfasilitasi kegiatan DPRD dan mengkoordinasikan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah, maka yang ingin dicapai/diwujudkan yaitu pelayanan untuk menunjang tugas-tugas DPRD sehingga setiap kegiatan DPRD dapat berjalan dengan lancar dan terarah serta mencapai hasil dengan baik, sehingga sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya kinerja DPRD serta makin meningkatnya stabilitas daerah yang kondusif dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan isu-isu strategis, yaitu sebagai berikut :

4. Struktur Organisasi, jumlah pegawai dan sarana/prasarana kerja serta jumlah anggaran yang ada merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dan digerakkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur
5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pegawai, sarana/prasarana yang belum lengkap dan kurang memadai perlu semakin ditingkatkan guna mendukung perkembangan tugas-tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan.
6. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD, merupakan tantangan yang harus direspons dengan baik, melalui dukungan kinerja staf Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat.
7. Pemahaman yang berbeda antara sekretariat DPRD dan DPRD terhadap penerapan peraturan dan perundang-undangan dalam implementasi kerja kegiatan-kegiatan DPRD.



Gambar 1.2
Publikasi Laporan Kinerja Sekretariat DPRA pada Website PPID Timur
Tahun 2023

<input type="checkbox"/>	Nama Informasi	Kategori	Author	Tahun	
<input type="checkbox"/>	IKU 2021-2026 Sekretariat DPRD	IKU INFORMASI BERKALA	Sekretariat DPRD	2023	...
<input type="checkbox"/>	TUPOKSI, STRUKTUR ORGANISASI, DAFTAR URUT KEPANGKATAN Sekretariat DPRD	Tupoksi INFORMASI BERKALA	Sekretariat DPRD	2021	...
<input type="checkbox"/>	RENCANA AKSI TAHUN 2023 Sekretariat DPRD	Rencana Aksi INFORMASI BERKALA	Sekretariat DPRD	2023	...
<input type="checkbox"/>	LAKIP SEKRETARIAT 2022 Sekretariat DPRD	LAKIP INFORMASI BERKALA	Sekretariat DPRD	2022	...
<input type="checkbox"/>	RENJA TAHUN 2023 Sekretariat DPRD	RENJA INFORMASI BERKALA	Sekretariat DPRD	2023	...
<input type="checkbox"/>	RENSTRA SEKRETARIAT DPRD 2022-2026 Sekretariat DPRD	RENSTRA INFORMASI BERKALA	Sekretariat DPRD	2022	...

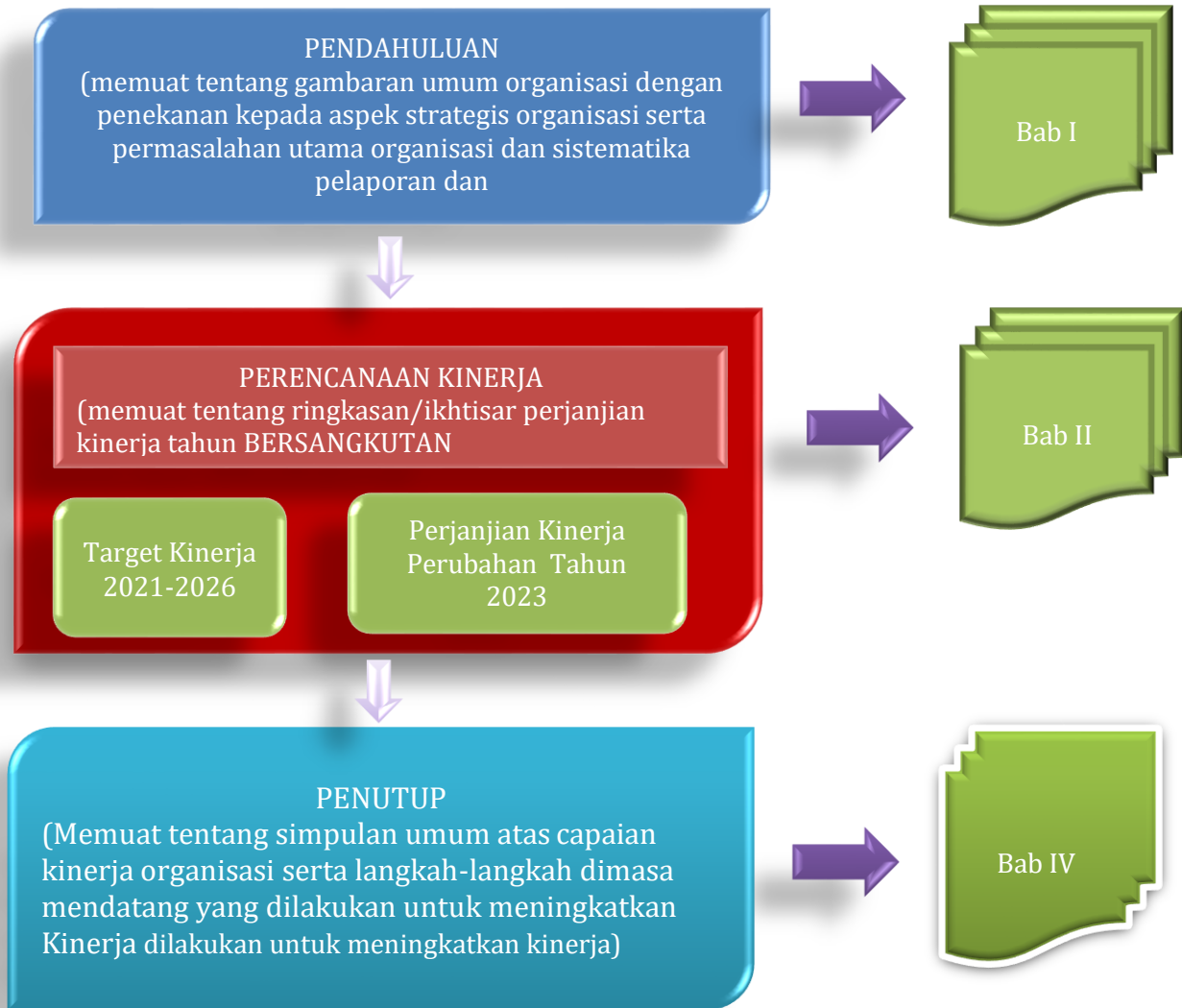
Showing 61 to 66 of 66 record (filtered 4,115 all record)

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan atau lakip merupakan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan .

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan dengan bagan sebagai berikut :





2**BAB 2 PERENCANAAN KINERJA****II.1 PERENCANAAN STRATEGIS**

Rencana Strategis Sekretariat DPRD kab.Luwu Timur merupakan bagian dari perencanaan daerah, sehingga harus sinkron dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan yang mengacu pada target indikator-indikator yang ditetapkan serta mendukung program-program prioritas Pemerintah Daerah. Perencanaan strategis adalah suatu langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan aktual/kekinian dari masyarakat sarasannya yang diselaraskan dengan visi dan misi organisasi serta mempertahankan faktor kekuatan, tantangan, hambatan, serta peluang yang membentang di depan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Rencana strategis Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur Tahun 2021-2026 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaian melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sehingga kinerja dilingkungan Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur dapat terus ditingkatkan. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga Sekretariat DPRD Kab.Luwu timur menetapkan rencana strategi tahun 2021-2026 sebagai acuan dalam rencana menyusun kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi serta tujuan strategis Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur.



1. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran masa depan organisasi. Visi dapat memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan, menginspirasi anggota, memotivasi anggota agar memberikan kontribusi yang maksimal.

Adapun **Visi** Sekretariat DPRD sejalan dengan Visi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 yaitu **Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama Dan Budaya.**

Dalam rumusan visi ini terkandung makna dari setiap pokok visi adalah sebagai berikut:

- **Berkelanjutan** yang mengandung makna bahwa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjuta dari apa yang di lakukan hari ini, kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan, pembangunan yang dilakukan ditekankan pula pada pentingnya mempersiapkan generasi penerus dari generasi yang ada pada saat ini.
- **Lebih maju** mengandung makna apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian – capaian yang menggembirakan di masa lalu tidak harus membuat Luwu Timur menjadi legah, melainkan ini sejainya menjadi motifasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi.
- **Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya** mengandung makna apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujudkan Ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap Langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan masyarakat.

2. PERNYATAAN MISI

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan



visi yang telah ditetapkan, maka Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu sebagai berikut :

MISI Ke- 4 RPJMD
"Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik"

SASARAN 8 RPJMD
"Meningkatnya kualitas pelayanan publik"

3. Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai, dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik yang dapat diukur. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun hubungan anatar tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah Sekretariat DPRD kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Renstrayang berkaitan dengan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :





Tabel 1

Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran dan target kinerja sasaran RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL TAHUN 2020	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapsitas /Kinerja DPRD	Persentase Kinerja Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	72,27%	72,27%	90%	90%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	83,33%	83,33%	90%	90%	100%	100%	100%	100%

B. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Luwu Timur kepada Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk melaksanakan program/ kegiatan disertai dengan target indikator kinerja. Dengan perjanjian kinerja ini diharapkan terwujud komitmen antara pemberi amanah (Bupati) dengan penerima amanah (Sekretaris Dewan) dan kesepakatan antara pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Perubahan 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	90%
		Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	90%
2	Meningkatnya kualitas Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pada Sekretariat DPRD	100%

Penetapan Kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kirja utama yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Tahun 2023 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur Sebesar Rp 44.813.897.559,- (Empat Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Delapan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2023

Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) terdiri dari belanja pegawai Rp 16.477.447.373,- Belanja Barang dan Jasa Rp 22.262.950.186,- dan belanja modal Rp 6.073.500.000.

Adapun Program dan Anggaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3
Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	28.609.615.323	APBD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	16.204.282.236	APBD
J U M L A H		44.813.897.559	



3

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk mendorong terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan tingkat capaian target indikator kinerja utama sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja dan capaian target indikator kinerja utama (IKU).

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Hasil Pengukuran capaian kinerja Tahun 2023 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan



Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Sekretaris DPRD dengan Bupati Luwu Timur. Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 4
Tingkat Akuntabilitas Kinerja



NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
1	AA	> 90	Sangat Memuaskan
2	AA	> 80-90	Memuaskan Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	> 70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	BB	> 60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5	C	> 50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban
6	CC	> 40-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	> 50-40	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk menerapkan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Adapun capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :



Tabel 5
Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NOTIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	90%	80%	88,89%	
		Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	90%	100%	111,11%	
2	Meningkatnya kualitas Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	97,17%	97,17%	

Keterangan :  Mencapai/Melampaui Target ;  Belum Mencapai Target

III. 2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

1. Capaian Kinerja

Pada Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 2 indikator kinerja dari 1 sasaran. Dalam menganalisa keberhasilan atau ketidakberhasilan capaian sasaran strategis dilakukan dengan mengukur capaian indikator outcome. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian realisasi keuangan. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :



SASARAN I

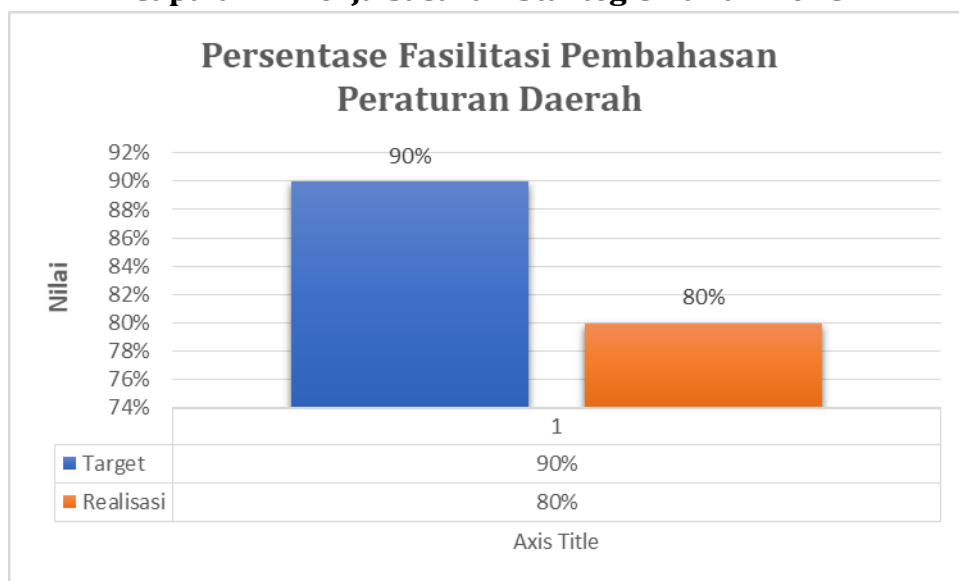
Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik

Indikator 1

Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah

Indikator Kinerja Indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target dengan Formulasi sebagai berikut :

Jumlah Ranperda yang di tetapkan di bagi dengan jumlah yang di fasilitasi untuk di bahas di kali seratus persen , sumber data berasal dari bagian persidangan dan Perundang-Undangan (Dari OPD yang mengusulkan Ranperda).

Grafik 3**Capaian Kinerja Sasaran Startegis Tahun 2023****Tabel 6****Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I**

Sasaran I	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik
Indikator Sasaran 1	Tahun 2023



Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	Target	Realisasi	Capaian
	90%	80%	88,89%

2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

▪ Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah

Formulasi : Indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

Jumlah Ranperda yang di tetapkan di bagi dengan jumlah Ranperda yang di fasilitasi untuk di bahas di kali seratus persen , sumber data berasal dari bagian persidangan dan Perundang-Undangan (Dari OPD yang mengusulkan Ranperda).

Indikator sasaran I Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan target 90% dan terealisasi 80%, dengan persentase capaian kinerja 88,89%. Realisasi yang diperoleh merupakan hasil pelaksanaan kegiatan Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, selama bulan Januari sampai Desember tahun 2023 melalui tahapan :

2. Tahapan Perencanaan;

Sebelum penyusunan peraturan daerah (perda), dilakukan proses perencanaan perda dalam satu Program Legislasi Daerah (Prolegda). Prolegda adalah instrumen perencanaan Perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistimatis.

3. Tahapan penyusunan;

Rancangan peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau SKPD , Selain itu, rancangan perda dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

4. Tahapan pembahasan ;

Pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan oleh DPRD bersama SKPD, Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.



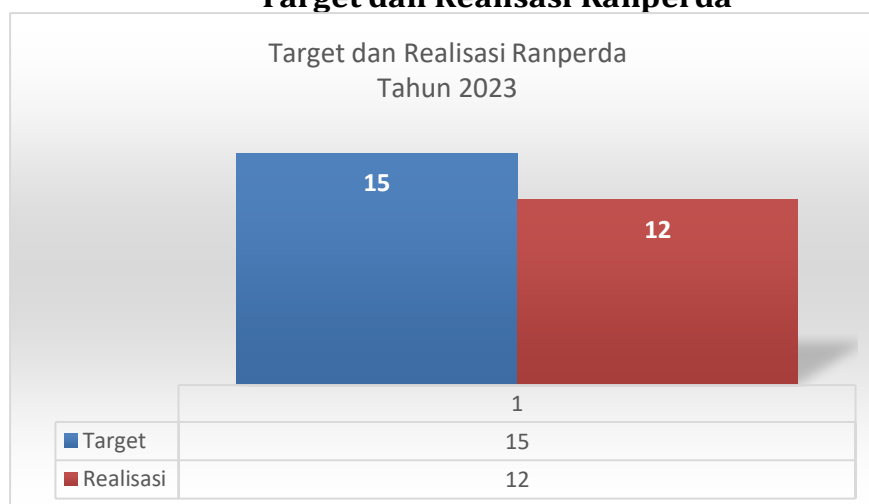
5. Tahapan pengesahan/Penetapan;

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan SKPD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penyampaian rancangan perda dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

6. Tahapan pengundangan ;

Peraturan daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh sekda. Adapun penjelasan perda diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah. Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Grafik 4
Target dan Realisasi Ranperda



Jumlah ranperda yang di targetkan untuk difasilitasi sebanyak 15 Ranperda dan yang terealisasi sebanyak 12 Ranperda Yang terdiri dari:

Tabel 7
Ranperda yang telah ditetapkan tahun 2023

No.	RANPERDA	TANGGAL PERSETUJUAN BERSAMA	SKPD	Nomor
1.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	6 Juni 2023	Bapenda	Nomor : 188.342/1/Pem-LT/VI/2023 Nomor : 188.3422/1/DPRD-LT/VI/2021



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022

2.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa	4 Juli 2023	DDPMD	Nomor : 188.342/2/Pem-LT/VII/2023 Nomor : 188.3422/2/DPRD-LT/VII/2023
3.	Penyelenggaraan Bantuan Hukum	4 Juli 2023	Bag. Hukum Setda	Nomor : 188.342/2/Pem-LT/VII/2023 Nomor : 188.3422/2/DPRD-LT/VII/2023
4.	Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	13 Juli 2023	Semua SKPD	Nomor : 188.342/3/Pem-LT/VII/2023 Nomor : 188.3422/3/DPRD-LT/VII/2023
5.	Perubahan APBD 2023	21-Sep-23	Semua SKPD	Nomor : 188.342/8/Pem-LT/IX/2023 Nomor : 188.3422/8/DPRD-LT/IX/2023
6.	APBD 2024	23-Nov-23	Semua SKPD	Nomor : 188.342/12/Pem-LT/XI/2023 Nomor : 188.3422/12/DPRD-LT/XI/2023
7.	Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang	18 Desember 2023	Bag. Ekbang Setda	Nomor : 188.342/13/Pem-LT/XII/2023 Nomor : 188.3422/13/DPRD-LT/XII/2023
8.	Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang	19 Desember 2023	BKAD	Nomor : 188.342/14/Pem-LT/XII/2023 Nomor : 188.3422/14/DPRD-LT/XII/2023
9.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten	19 Desember 2023	Bag. Organisasi Setda	Nomor : 188.342/14/Pem-LT/XII/2023



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022

	Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah			Nomor : 188.3422/14/DPRD-LT/XII/2023
10.	Sistem Pertanian Organik	19 Desember 2023	Inisiatif DPRD	Nomor : 188.342/14/Pem-LT/XII/2023 Nomor : 188.3422/14/DPRD-LT/XII/2023
11.	Pengelolaan Perikanan tangkap dan perikanan budidaya	19 Desember 2023	Inisiatif DPRD	Nomor : 188.342/14/Pem-LT/XII/2023 Nomor : 188.3422/14/DPRD-LT/XII/2023
12.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak	19 Desember 2023	Dinsos	Nomor : 188.342/14/Pem-LT/XII/2023 Nomor : 188.3422/14/DPRD-LT/XII/2023

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

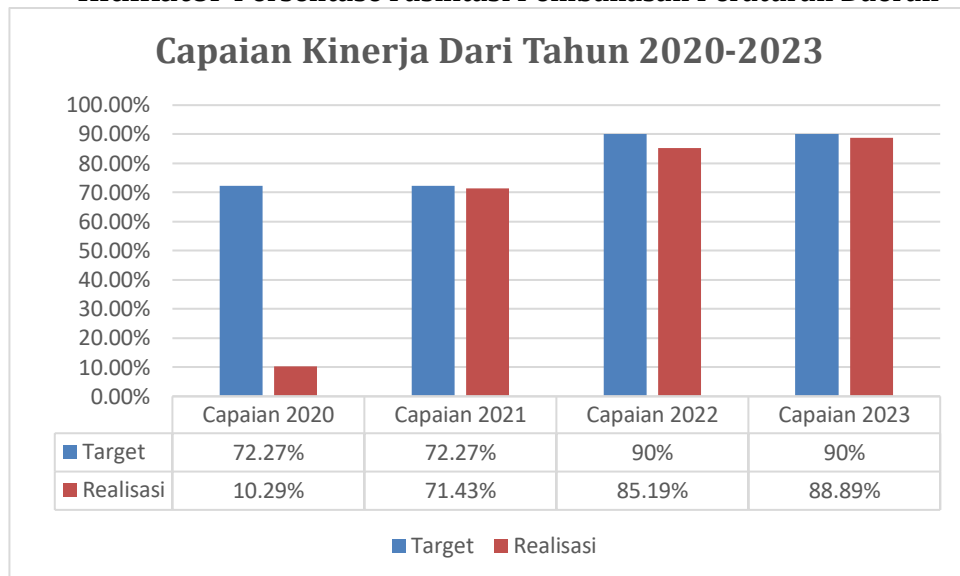
Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 8
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah

Indikator Kinerja 1	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1	2	3	4	5
Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	10,29%	71,43%	85,19%	88,89%



Grafik 5
Realisasi Capaian Kinerja
Indikator Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah



Pada tabel di atas, digambarkan capaian kinerja pada indikator 1 Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah dari tahun 2019 sampai tahun 2023 menunjukkan peningkatan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan target target jangka menengah dalam renstra digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 9
Perbandingan antara Realisasi dengan Target Renstra
Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah Tahun 2024-
2025

Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Target
	2023	2024	2025
Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	88.89%	100%	100%

✚ Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Fasilitasi Pembahas Peraturan Daerah yaitu :



- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - ✚ Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.

Indikator 2
Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti

Indikator Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti dengan formulasi Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti di bagi Jumlah Rekomendasi DPRD dikali Seratus Persen.

5. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 melebihi dari target yang akan dicapai sebesar 111%. Perbandingan antara target dan realisasi Rekomendasi dapat dilihat dari tabel di bawah ini **Tabel 10**

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran I	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		
Indikator Sasaran 2	Tahun 2023		
Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Target	Realisasi	Capaian
	90%	100%	111,11%

Berdasarkan tabel di atas Rekomendasi melebihi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan penilaian Rekomendasi DPRD terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah dan tindak lanjut atas LHP-BPK.



6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

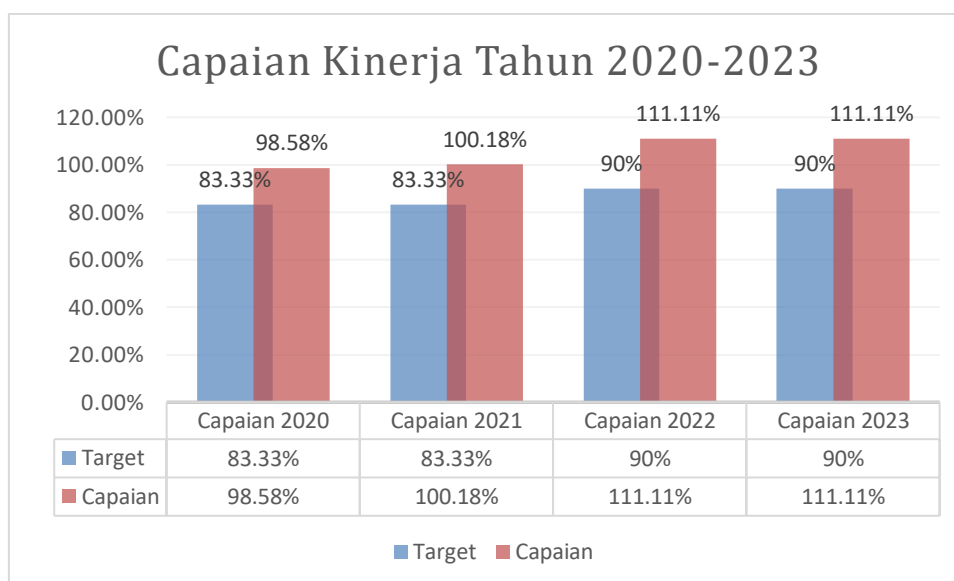
Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya di gambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 11
Perbandingan antara capaian kinerja
Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja 2	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1	2	3	4	5
Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	98,58%	100,18%	111,11%	111,11%

Grafik 6

Realisasi Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti



Pada tabel di atas, digambarkan capaian kinerja pada indikator 2 Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti dari tahun 2020 sampai tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu pemicu meningkatnya capaian kinerja adalah fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan perda kabupaten/kota dan peraturan Bupati/wali kota, dan pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan BPK-RI atas laporan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022

Keuangan Pemerintah Daerah, untuk kemudian memberikan penilaian dan rekomendasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun berkenaan.

7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam renstra digambarkan padatable berikut ini:

Tabel 12
Perbandingan Antara Realisasi dengan Target Renstra
Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Target
	2023	2024	2025
Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	111,11%	100%	100%

III. 3. Analisa Penyebab Peningkatan dan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

a. Faktor Penghambat :

Beberapa faktor Penghambat tercapainya sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur antara lain adalah :

- Alokasi waktu:
Alokasi waktu yang disediakan dalam pelaksanaan fungsi legislasi terserap tidak secara optimal.
- Perdebatan Teknis Pembahasan;
Perdebatan masalah teknis penyusunan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentu menghambat jalannya proses peraturan daerah tersebut;
- Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing SDM pelaksanaan dan juga penetapan target kinerja yang belum sesuai ;



b. Faktor Pendorong

Beberapa faktor Penghambat tercapainya sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur antara lain adalah :

- Mengoptimalkan pelayanan terhadap kegiatan DPRD, Jajaran Aparatur Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur dapat memahami dan menilai arah kebijakan program serta kegiatan pada tahun berikutnya.
- Meningkatkan sumber daya manusia pada Lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar wawasan dari kinerja dapat dirasakan manfaatnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD.

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Aparatur

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur diakhir tahun 2023 terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris DPRD, 3 (tiga) orang Kepala Bagian, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, 4 (empat) orang Fungsional, 10 (sepuluh) orang Staf , 5 (lima) orang Sopir dan 21 (dua puluh satu) orang Cleaning Service.

b. Sarana dan Peralatan Kerja Utama

Penunjang kelancaran operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dengan sarana dan peralatan kerja. Sarana dan peralatan kerja pada Sekretariat DPRD kabupaten Luwu Timur antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13
Sarana dan Peralatan Kerja Utama

No	Jenis & Nama Saran Peralatan Kerja	Jumlah/Satuan
1	Kendaraan Roda Empat	8
2	Kendaraan Roda Dua	1
3	Laptop	
4	Komputer/PC	
5	Printer	



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022

6	Ruang Banggar	1 unit
7	Ruang Komisi	3 unit
8	Ruang Rapat Paripurna	1 unit
9	Ruang Rapat Aspirasi	1 unit
10	Ruang Sekwan	1 unit
11	Ruang Pimpinan	3 unit
12	AC	
13	Scanner	6 Unit

❖ **Analisis Efisiensi Sumber Daya**

Tabel. 14
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (RP)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	90%	80%	88,89%	2.284.932.506	1.873.946.628	82,01
	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	90%	100%	111%	788.058.750	647.785.022	82,20
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Kegiatan Legislasi yang Fasilitasi	90%	89,67%	99,63%	16.204.282.236	13.412.500.921	82,77

Tabel. 15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	%Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	88,89%	81,02%	7,87%



Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	111%	82,20%	28,80%
---	--	------	--------	--------

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik, **indikator 1** sebesar 88,89% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 81,02%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 7,87%.

Dan **Indikator 2** sebesar 111% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 82,20%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 28,80%.

Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

4. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian

Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis maka ada 1 Program, 8 Kegiatan dan 23 sub kegiatan yaitu :

a. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD.

Alokasi anggaran untuk program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 16.204.282.236,- dan terealisasi sebesar Rp 13.412.500.921,- atau sebesar 82,77%.

Indikator program adalah Persentase Kegiatan Legislasi yang difasilitasi dengan target 90% dan terealisasi sebesar 89,67%.

📌 Kegiatan

1) Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 2.284.932.506. Teralisasi sebesar Rp 1.873.946.628,- atau sebesar 82,01%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD.

Formulasi pengukuran capaian kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Hasil} &= \frac{\text{Jumlah Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah yang terlaksana}}{\text{Jumlah Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah yang direncanakan}} \times 100 \\ &= \frac{2 \text{ Kegiatan}}{2 \text{ kegiatan}} \times 100 \end{aligned}$$

Kegiatan ini diukur berdasarkan pelaksanaan 2 Sub Kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

- **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan**

Alokasi anggaran untuk Sub kegiatan ini adalah Rp 300.678.995,- Teralisasi sebesar Rp 250.466.710,- atau sebesar 83,30%. Realisasi tidak mencapai 100% di karenakan Ada 2 buah Ranperda di TW IV yaitu Ranperda Zonasi Nilai Jual Harga Tanah, namun dikembalikan oleh pihak eksekutif/tidak dibahas lagi dan Ranperda Penyesuaian Kecamatan Kalaena dan Kecamatan Angkona, namun belum dibahas dengan adanya moratorium pemutakhiran data kode wilayah sesuai surat edaran Mendagri.

- **Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah**

Alokasi anggaran untuk Sub kegiatan ini adalah Rp 1.984.253.511,- Teralisasi sebesar Rp 1.623.479.918,- atau sebesar 81,82%. Realisasi tidak mencapai 100% di karenakan Ada 2 buah Ranperda di TW IV yaitu Ranperda Zonasi Nilai Jual Harga Tanah, namun dikembalikan oleh pihak eksekutif/tidak dibahas lagi dan Ranperda Penyesuaian Kecamatan Kalaena dan Kecamatan Angkona,



namun belum dibahas dengan adanya moratorium pemutakhiran data kode wilayah sesuai surat edaran Mendagri.

2) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung Fungsi penganggaran yang diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 788.058.750. Teralisasi sebesar Rp 647.785.022,- atau sebesar 82,20%. Keluaran kegiatan ini adalah Terfasilitasinya Pembahasan Kebijakan anggaran. Formulasi pengukuran capaian kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pembahasan} &= \frac{\text{Jumlah kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang direncanakan}} \times 100 \\ &= \frac{6 \text{ sub Kegiatan}}{6 \text{ sub kegiatan}} \times 100 \end{aligned}$$

Kegiatan ini diukur berdasarkan pelaksanaan 6 Sub Kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS

Pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2023 disampaikan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada DPRD melalui Jadwal surat Nomor : 15/BAMUS/VII/22023 tanggal 10 juli 2023 dan untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan. Capaian kinerja pada kegiatan ini adalah sebesar 100%, dimana telah terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS sampai dengan penandatanganan persetujuan.

Alokasi Anggaran untuk sub kegiatan ini adalah Rp 59.622.450. Teralisasi sebesar Rp 59.388.362,- atau sebesar 99,61%. Keluaran sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS.





- **Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS**

Capaian kinerja pada kegiatan ini adalah sebesar 100%, dimana telah terlaksananya pembahasan Perubahan KUA dan PPAS dan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sampai dengan penandatanganan persetujuan dokumen Perubahan KUA dan PPAS antara DPRD kabupaten luwu Timur dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Alokasi anggaran untuk Sub kegiatan ini sebesar Rp. 45.866.050,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.483.500,- (99,17%).



- **Sub Kegiatan Pembahasan APBD**

Capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 100%, yang dilaksanakan dengan memfasilitasi DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan Pembahasan APBD dengan dukungan anggaran sebesar Rp.242.592.300,-. Serapan anggaran sub kegiatan ini belum maksimal dengan realisasi sebesar Rp. 183,732.960,- (75,74%). di karenakan Sisa Anggaran perjanan Dinas (Fasilitasi ke biro terbatas).

- **Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan**

Capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 100%, yang dilaksanakan dengan memfasilitasi DPRD dan Pemerintah Luwu Timur untuk melakukan Pembahasan Perubahan APBD dengan dukungan anggaran sebesar Rp.254.157.600,-. Dengan realisasi Rp 173.622.500,- atau 63,31%. yang disebabkan Sisa Anggaran perjanan Dinas (Fasilitasi ke biro terbatas). Dan beberapa agenda rapat tidak terlaksana sesuai dengan target yang Direncanakan.

- **Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD**

Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah sebesar 100%, dimana Pembahasan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD telah terlaksana. dengan dukungan anggaran sebesar Rp.185.820.350,-. Dengan realisasi Rp 185.557.700,- atau 99,86%.

3) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 5.593.406.916. Teralisasi sebesar Rp 4.284.874.373,- atau sebesar 76,61%. Terasilisasinya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung Fungsi Pengawasan DPRD yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah



menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan pengawasan dilaksanakan melalui fasilitasi rapat-rapat, perjalanan dinas dalam rangka melakukan pengawasan ke dalam daerah dan fasilitasi perjalanan dinas dalam rangka melakukan koordinasi dan konsultasi ke dalam Provinsi dan ke luar Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan diukur berdasarkan formulasi di bawah ini:

$$\begin{aligned} \text{Hasil} &= \frac{\text{Jumlah kegiatan pengawasan yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan pengawasan yang direncanakan}} \times 100 \\ &= \frac{5 \text{ Sub Kegiatan}}{5 \text{ Sub kegiatan}} \times 100\% \end{aligned}$$

Diukur berdasarkan pelaksanaan 5 Sub Kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

✚ Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum merupakan bidang tugas Komisi I dengan jumlah Anggota DPRD Kab Luwu Timur sebanyak 10 orang, dalam hal ini Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD memfasilitasi rapat kerja Komisi I dengan Pemerintah Aceh, kegiatan kunjungan kerja, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan pengaduan masyarakat, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Pagu anggaran untuk mendukung sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.729.590.600,-, dengan realisasi Rp 1.179.956.483,- atau 68,22%. Realisasi tidak mencapai target di karenakan kegiatan yang bertepatan dengan beberapa jadwal badan musyawarah DPRD terdapat kegiatan bertepatan waktunya dengan kegiatan lain, sehingga Dewan akan memilih kegiatan mana yang akan



diikuti.

✚ Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan infrastruktur dilaksanakan oleh Komisi III dengan jumlah Anggota DPRD sebanyak 11 orang. Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 100%.

Alokasi anggaran untuk mendukung sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.825.964.875,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.490.346.880,- (81,62%). Disebabkan karena beberapa kegiatan yang bertepatan dengan beberapa jadwal badan musyawarah DPRD terdapat kegiatan bertepatan waktunya dengan kegiatan lain, sehingga Dewan akan memilih kegiatan mana yang akan diikuti.

✚ Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Bidang Perekonomian

Pengawasan urusan pemerintahan bidang Perekonomian yang pelaksanaannya berada pada Komisi II dengan jumlah Anggota DPRD sebanyak 10 orang, dengan capaian sebesar 100%. Pagu anggaran tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp. 1.723.465.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.304.892.908,- (75,71%). Disebabkan karena beberapa kegiatan yang bertepatan dengan beberapa jadwal badan musyawarah DPRD terdapat kegiatan bertepatan waktunya dengan kegiatan lain, sehingga Dewan akan memilih kegiatan mana yang akan diikuti sehingga daya serap anggaran tidak maksimal.

✚ Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Pengawasan dimaksud dapat berupa pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. DPRD juga melakukan monitoring kepada



Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Yang bertujuan untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 serta mengeluarkan beberapa rekomendasi dalam bentuk laporan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD kab.Luwu Timur. Pagu anggaran tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp. 168.057.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 164.151.849,- (97,68%).

✚ Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 yang merupakan bentuk evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang menggambarkan indikator kinerja, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, kebijakan dalam pemerintahan. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Capaian kinerja 100%. Tahun Anggaran 2023 sub kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 146.328.341,- dengan realisasi Rp 145.526.253,- (99,45%).

4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Luwu Timur dalam menjalankan fungsi wewenang dan tugasnya diperlukan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 2.215.593.850,-. Teralisasi sebesar Rp 1.958.757.005,- atau sebesar 88,41%. capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan diukur berdasarkan



formulasi di bawah ini:

$$\text{Hasil} = \frac{\text{Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang terlaksana} \times 100}{\text{Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang direncanakan} \times 100}$$

4 Sub Kegiatan X 100
4 Sub kegiatan

Diukur berdasarkan pelaksanaan 4 Sub Kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

✚ Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD

Capaian Realisasi Kinerja 100% . Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah Rp 1.826.060.850,-. Teralisasi sebesar Rp 1.621.783.405,- atau sebesar 88,41%. Realisasi anggaran tidak mencapai target yang telah di tentukan di sebabkan , sisa Anggaran bimtek yg akan dilaksanakan d luar prov. tdk dapat mengcover biaya perjalan bimtek tersebut.di Sebabkan Oleh Adanya penembahan bimtek yang dilaksanakan oleh Partai.



Tabel 16
KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN PIHAK KETIGA URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN SAMPAI TAHUN 2023

No	Perangkat Daerah	Instansi Mitra MoU	Tanggal Mou	Nomor MoU	Perihal MoU
1	Sekretariat DPRD	Universitas Muslim Indonesia (UMI)	27-Apr-23	100.3.7/277/Setwan/2023 1478/c.06/UMI/IV/2023	Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
2	Sekretariat DPRD	Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LKPM)	27-Sep-23	156/C.03/MOV/LPPM/STIE-WB/XII/2023 094/082/SETWAN/	Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur

✚ Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2017, Jumlah maksimal tenaga ahli yang disediakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang melekat pada Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya adalah sebanyak 3 orang, sehingga total tenaga ahli yang disediakan pada tahun 2023. Dengan capaian realisasi kinerja 100%. Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah Rp 133.221.000,-. Teralisasi sebesar Rp 82.138.600,-

✚ Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Penyediaan tenaga ahli fraksi yang tersedia pada tahun 2023 (sesuai PP No.18 Tahun 2017) adalah sebanyak 6 orang dan terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan (100%). Alokasi anggaran yang disediakan untuk tenaga ahli ini adalah sebesar Rp. 252.000.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.252.000.000,- (100%).

✚ Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD

Kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan yaitu penyusunan RENJA DPR, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Pagu anggaran untuk mendukung Sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.312.000,- dan terealisasi Rp. 2.655.000,- atau 61,57%. Capaian Realisasi Keuangan tidak mencapai target dikarenakan terdapat sisa



anggaran Makan Minum Rapat.

5) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk mendukung kegiatan DPRD dalam upaya menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat.

Formulasi pengukuran capaian kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Hasil} &= \frac{\text{Jumlah kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang direncanakan}} \times 100 \\ &= \frac{2 \text{ sub Kegiatan}}{2 \text{ sub kegiatan}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa Kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat terlaksana dengan target yang direncanakan 100% dengan capaian kinerja sebesar 94,75%. Pagu anggaran untuk mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.470.509.130,- dan terealisasi Rp. 1.393.348,600,- atau 94,57%.

Kegiatan ini diukur berdasarkan pelaksanaan 2 Sub Kegiatan dengan Penjelasan sebagai berikut :

✚ Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, menyebutkan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan ke dalam e-planning bagi daerah yang telah memiliki SIPD. Pelaksanaan Sub kegiatan ini terlaksana dengan target 3 kali dan terealisasi 2 kali dilaksanakan atau 66,67% . Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 18.391.880,- dan realisasi 17.820.600,- atau 96,89%.

• Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses

Reses adalah salah satu kegiatan strategis dan penting, karena dengan adanya pelaksanaan reses Pimpinan dan Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk mengunjungi konstituennya di dapil masing-masing untuk menyampaikan hasil kerjanya, memantau pembangunan, melihat permasalahan di dapil, melakukan pengawasan implementasi pembangunan dan kebijakan dan menjaring aspirasi konstituen. Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2023 dilakukan selama 4 (Empat) hari dan telah difasilitasi serta terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan persentase capaian sebesar 100%, sama seperti tahun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat dibawah ini:

1. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Reses Perseorangan Masa Sidang 1 Tahun 2022/2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur
2. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Reses Perseorangan Masa Sidang II Tahun 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur
3. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Reses Perseorangan Masa Sidang III Tahun 2022/2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur 2022.

Adapun jumlah anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.452.117.250,- dengan realisasi Rp. 1.375.528.000 atau (99,34%).

Dokumentasi Reses Perseorangan





6) Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Badan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPRD adalah lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat baik di DPRD RI maupun di DPRD, keberadaan lembaga ini untuk menjawab kebutuhan arus informasi yang menuntut adanya perubahan, keberadaan lembaga ini juga sangat penting dan strategis guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (good and clean governance). Lembaga ini merupakan lembaga pengawasan internal DPRD guna menegakan kode etik dan Tata Tertib DPRD.

Maka terbentuklah Badan Kehormatan (BK) DPRD. Besaran pagu anggaran tahun 2023 Rp 37.818.810, dengan realisasi Rp 34.835.000,- atau 92,11%.

7) Kegiatan Kerjasama Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa Kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat terlaksana dengan target yang direncanakan 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Pagu anggaran untuk mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.202.340.000,- dan terealisasi Rp.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022

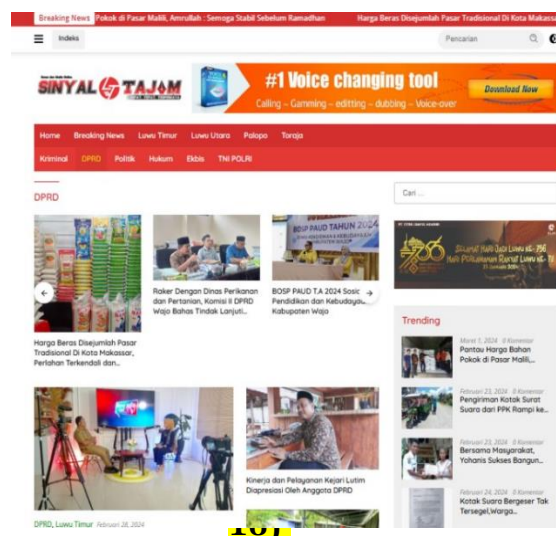
1.198.263.247,- atau 99,66%.

Kegiatan ini diukur berdasarkan pelaksanaan Sub Kegiatan dengan Penjelasan sebagai berikut :

- **Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi**

Kegiatan publikasi dan dokumentasi Dewan dilaksanakan dengan mempublikasikan segala kegiatan/aktifitas pimpinan dan anggota DPRD pada tahun 2023 melalui media elektronik, media cetak, online dan parlementaria. Capaian kinerja Sub kegiatan ini 100% . Pagu anggaran untuk mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.202.340.000,- dan terealisasi Rp. 1.198.263.247,- atau 99,66%.

Dokumentasi Media Online



17) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Peraturan Tata Tertib. DPRD mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD, menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya. Target Capaian kinerja 90% dan realisasi capaian kinerja kegiatan ini 88% , kegiatan ini tidak



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022

mencapai target dikarenakan untuk perjalanan Pimpinan disediakan Apabila ada undangan pimpinan pada saat mengikuti Rakor . Jumlah Pagu Anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp.2.611.622.274,- dengan Realisasi Rp. 1.997.099.546,- (77,37%).

Adapun kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD yang terlaksana, yaitu:

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD**

Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu melakukan kunjungan kerja ke luar daerah untuk berkoordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan agenda, tugas dan fungsi DPRD Dalam hal ini Sekretariat DPRD melalui Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan telah memfasilitasi kegiatan tersebut di atas sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pada Sub Kegiatan ini di targetkan 100 Dokumen dan terealisasi 64 Dokumen atau (64%), disebabkan perjalanan Pimpinan disediakan Apabila ada undangan pimpinan pada saat mengikuti Rakor.

Adapun jumlah anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.584.033.500,- dengan realisasi Rp. 1.997.099.546,- atau (77,29%).



- **Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah**

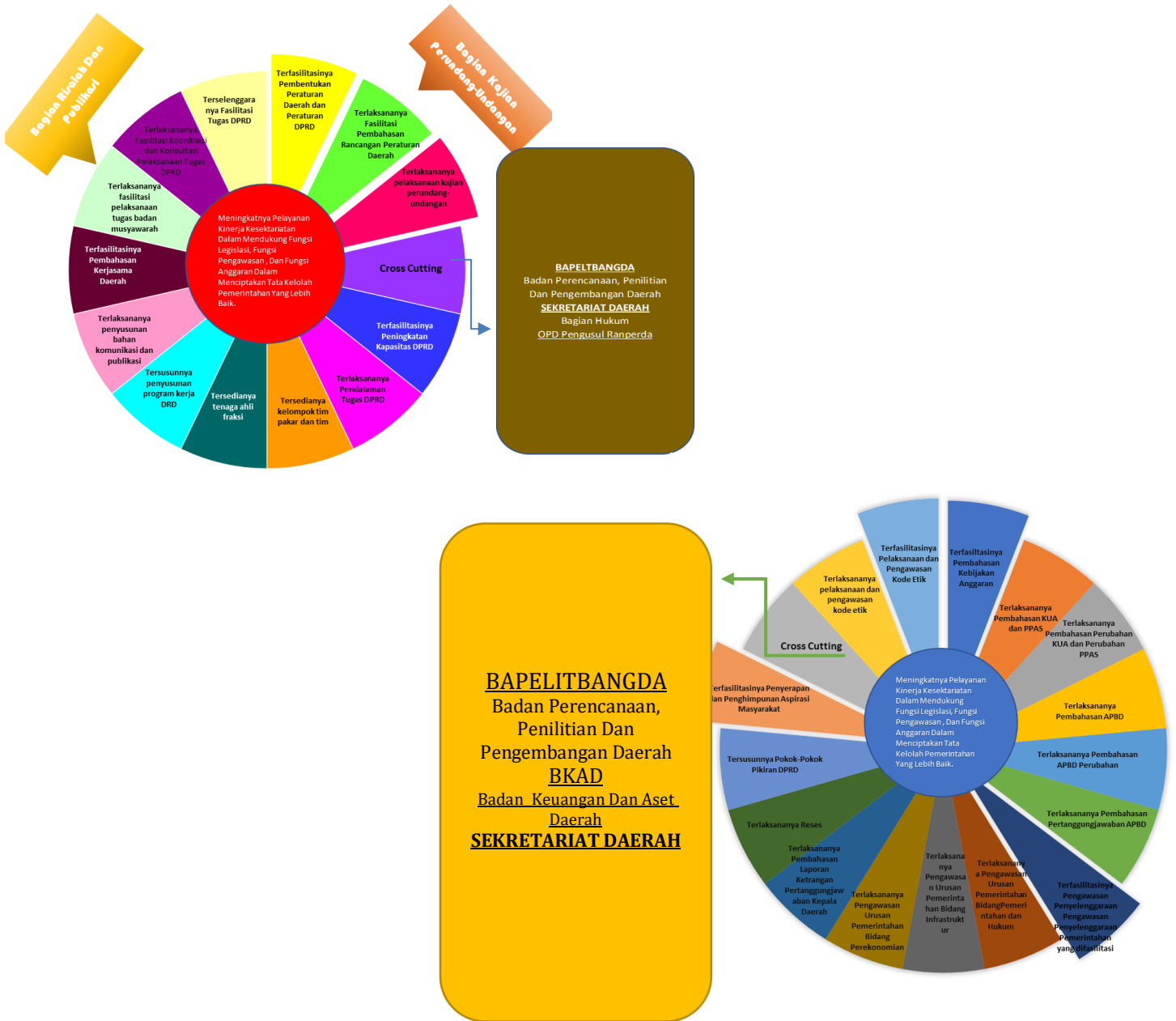
Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota. Target dari sub kegiatan ini 4 dokumen dan terealisasi 4 dok atau 100%, Alokasi pagu anggaran murni untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 27.588.774, dan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.591.500,- (85,51%). Realisasi anggaran sub kegiatan ini tidak maksimal dikarenakan terdapat sisa anggaran makan dan minum rapat.

Dokumentasi Rapat Bamus

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022

Adapun Crosscutting Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD , Terdapat 2 Bagian Yaitu Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dan Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran ,

Gambar 1.4



SASARAN II

Meningatnya Kualitas Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Indikator ;
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 17
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran 2	Meningatnya Kualitas Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			Notifikasi
Indikator Sasaran	Tahun 2023			
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Target	Realisasi	Capaian	●
	100%	97%	97,17%	

Keterangan ● Mencapai/Melampui Target, ● Belum Mencapai Target

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

❖ Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah "Jumlah capaian kinerja program dibagi target sasaran dikali seratus" Target Indikator sasaran penunjang Tahun 2023 adalah 100% dan realisasi 97,17% dengan persentase capaian kinerja 97,17%.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :



- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendataan dan Pengolaha Administrasi Kepegawaian
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan



Listrik

- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan Aet Tetap Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
9. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - c. Pelaksanaan Medical Check up
10. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD
 - a. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

➤ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a. Keterlambatan proses administrasi keuangan
- b. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa (e-catalog)
- c. Terdapat sub kegiatan yang sifatnya disediakan, yang penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan

➤ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- a. Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa (e-catalog)
- b. Mencermati rekening belanja untuk sub kegiatan yang sifatnya disediakan agar tidak menjadi Silfa



c. Percepatan administrasi pertanggungjawaban keuangan

➤ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran pendukung BPBD, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- a. Efisiensi anggaran pada belanja Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD dengan memaksimalkan anggaran yang ada.
- b. Efisiensi anggaran pada belanja Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.
- c. Efisiensi belanja internet kantor yaitu, untuk biaya WIFI kantor, difasilitasi oleh Dinas KOMINFO

➤ **Efisiensi Sumber Daya**

- a. Belum Optimalnya Pembagian tugas pada lingkup sekretariat DPRD , dan untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
- b. Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

❖ **Analisis Efisiensi Sumber Daya**

Tabel 18
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran II	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (RP)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningatnya Kualitas Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	97,17%	97,17%	28.609.615.323	26.502.724.433,70	92,64



Tabel. 19
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran II	Indikator Kinerja	%Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	97,17%	92,64%	4,53%

Pencapaian sasaran pendukung sebesar 97,17% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 92,64%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 4,53%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 20
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran II	Meningkatnya Kualitas Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah											
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022

Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	94,40%	94,40%	100%	95,19%	95,19%	100%	95%	95%	100%	97,17%	97,17%
--	------	--------	--------	------	--------	--------	------	-----	-----	------	--------	--------

❖ Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu :

- a. Beberapa kegiatan Secara Umum Telah di Laksanakan Namun Belum Melakukan Perubahan Target Pada Kegiatan
- b. PPTK memaksimalkan penyelesaian administrasi keuangan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 21
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026)

Sasaran II	Meningkatnya Kualitas Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2023 terhadap target akhir Renstra 2026
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	97,17%	100%	97,17%

Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung



Tabel. 22

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memada	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	97,17%	97,17%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan Evaluasi	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
2	Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	100%	100%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	22 orang	22 orang	100%
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triw ulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	18 laporan	18 laporan	100%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada skpd	Persentase BMD yang Diadministra sikan sesuai standar	100%	100%	100%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022

a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kinerja administrasi kepegawaian	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat	100%	98%	98%
a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kelengkapan data administrasi kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
b	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	22 Orang	21 Orang	95,45%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja administrasi umum perangkat daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	100%	95,73%	95,73%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	9 Jenis	9 Jenis	100%
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	5 Unit	5 Unit	100%
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis	100%
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	100%
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	100%
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2412 Exempler	2412 Exempler	100%
g	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	1000 Porsi	950 Porsi	95%
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	120 kali	103 kali	85,83%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022

6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan BMD-PD	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Perseorangan atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	4 Unit	4 Unit	100%
b	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	41 Unit	41 Unit	100%
c	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	8 Unit	8 Unit	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	172 Unit	172 Unit	100%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	98%	98%
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	2400 Surat Masuk/Keluar	2400 Surat Masuk/Keluar	100%
b	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 Rekening	36 Rekening	100%
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkannya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	21 Orang	20 Orang	95,24
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	212 Unit	97,58%	97,58%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	11 Unit	11 Unit	100%
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	190 Unit	167 unit	87,89%
c	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara	6 Unit	6 unit	100%



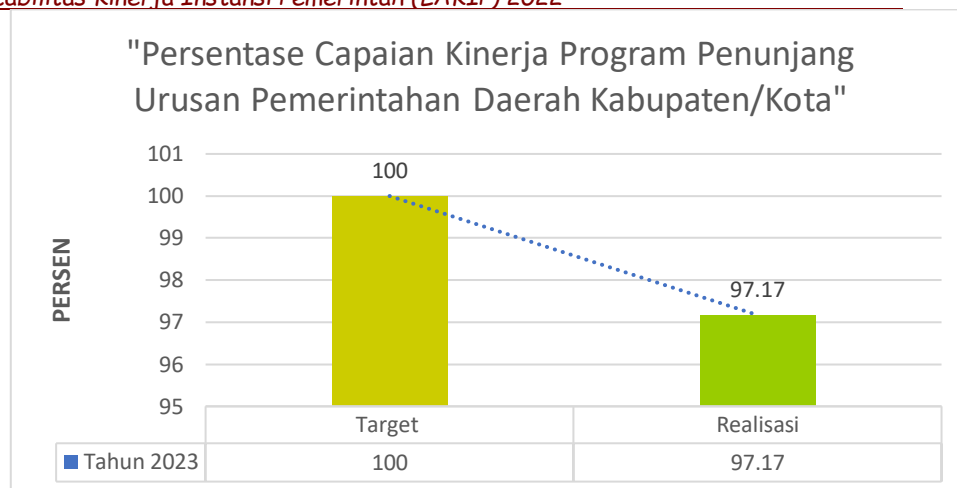
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022

d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	3 Unit	3 unit	100%
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlahsarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	3 unit	3 unit	100%
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	82,22%	82,22%
a	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarkannya Gaji danTunjangan Anggota DPRD yang terbayarkan	Jumlah Gaji danTunjangan Anggota DPRD yang terbayarkan	30 Orang	30 Orang	100%
b	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut anggota DPRD Yang disediakan	30 Orang	30 Orang	100%
c	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Terlaksananya Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang Melaksanakan Medical check-Up	30 Orang	14 Orang	46,67%
10	Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	persentase layanan administrasi DPRD	100%		100%
a	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang terfasilitasi dengan baik	2 Kali	2 Kali	100%
b	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah tangga DPRD	3 Unit	3 Unit	100%

✚ Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota





Grafik. 7
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV TA. 2023

Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 97,17% dengan capaian kinerja 97,17%, dan menyerap anggaran sebesar 92,64%. Capaian kinerja program tidak mencapai target karena terdapat beberapa kegiatan capaian kinerjanya $\leq 100\%$, sehingga berpengaruh terhadap kinerja program. Pencapaian Kinerja Program didukung oleh 10 kegiatan dan 34 sub kegiatan yaitu :

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu, dengan **Formulasi** : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 100%. Target dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun s.d TA. 2023 sebanyak 16 dokumen dan terealisasi 16 dokumen (100%) yaitu Dokumen DPA-SKPD TA. 2023, DPPA-SKPD TA. 2023, LAPKIN Tahun 2022, LKPJ, Laporan Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2022, Renja 2024, Renja Perubahan 2023, RKA-P TA. 2023, RKA TA. 2024 dan Laporan Evaluasi RKPD TW I, II, & III TA. 2023, Laporan Evaluasi Kinerja TW I, II & III TA. 2023. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :



a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu, dengan target sebanyak 2 dokumen dan direncanakan target s.d TA. 2023 sebanyak 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen (100%) yaitu Dokumen Renja Tahun 2024 dan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2023.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen (100%) yaitu RKA-SKPD Tahun 2024 dan RKAP-SKPD Tahun 2023.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu, dan target pada s.d TA. 2023 sebanyak 2 dokumen dan realisasi 2 Dokumen dengan persentase capaian kinerja 100%, terdiri dari dokumen DPA-SKPD TA. 2023 & DPPA-SKPD TA. 2023.

d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu, target pada sebanyak 10 dokumen dan realisasi 10 dokumen dengan persentase capaian kinerja 100% yaitu LAPKIN 2022, LKPJ, LPPD/SPM, Laporan Evaluasi Kinerja TW IV TA. 2022, Dokumen Evaluasi Kinerja TW I, II & III TA. 2023 dan RKPD Triwulan I, II & III TA. 2023

Dokumentasi Monev Internal



Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan adalah persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

e. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan, target 22 org dan realisasi 22 org dengan persentase capaian kinerja 100 %.

f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu, dengan target Triwulan IV sebanyak 18 dokumen dan realisasi 18 dokumen dengan persentase capaian kinerja 100%.

Kegiatan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun, dengan target sebanyak 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen (100%). Dokumen yang disusun adalah Laporan penatausahaan BMD sebanyak 4 dokumen (TW I,II,III dan IV).

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 95,45% dengan persentase capaian kinerja 95,45%. Capaian kinerja berdasarkan realisasi pelaksanaan bimtek/pelatihan yang disesuaikan dengan surat undangan/pemanggilan peserta. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

a. Sub Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah kelengkapan data administrasi kepegawaian, dengan target sebanyak 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen (100%). Dokumen yang disusun adalah Laporan Pendataan Administrasi sebanyak 4 dokumen (TW I,II,II dan IV).

b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan, dengan sebanyak 22 org dan realisasi 21 orang dengan persentase capaian kinerja 95,45%. Adapun bimtek/diklat yang diikuti yaitu Workshop Aplikasi SIRUP 2 org, Bimtek Jitupasna 2 org, Bimtek Asdeksi 6 orang, Bimtek MC 2 org, Bimtek PPK Type C sebanyak 3 org. Pelatihan Aplikasi SIM Gaji 3 org, TOT Jitupasna 1 org, Bimtek Pelaporan BMD 2 org,

 **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%.

Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi



Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan, target 8 jenis, dan terealisasi 9 jenis (100%). Adapun realisasinya yaitu Balon Lampu ,Kabel, Fitting, Terminal, Isolasi, klem kabel, bateray, stop kontak danlampu pijar.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan yang di sediakan, target 5 unit, dan terealisasi 5 unit (100%).

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan yang di sediakan, target 2 Jenis, dan terealisasi 2 Jenis (100%).

d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan, target 6 jenis dan realisasi 6 jenis (100%) terdiri dari BBM operasional, Oli Pelumas, alat & bahan pembersih 17 jenis (sendok sampah, stella matic, sabun cair, Tissue refil, Harpic, Pembersih lantai, keranjang sampah, alat pel, sapu, stella refil dll).

e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan, target 2 jenis setiap realisasi 2 jenis (100%) terdiri dari penggandaan, cetak dan jilid. Adapun barang cetakan tersebut yaitu cetak blamko SPPD, Blanko Cek, Banner, jilid dan penggandaan.

f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan, target s.d sebanyak 2412 exp dan terealisasi 2412 ekpl dengan capaian kinerja 100%, terdiri dari Koran lokal, Koran



Nasional 12 expl dan Koran Regional.

g. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah tamu yang difasilitasi, dengan target ssebanyak 1000 org dan terealisasi 950 org dengan capaian kinerja 95%. Fasilitasi kunjungan tamu untuk memfasilitasi biaya makanan dan minuman untuk tamu dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kecamatan/desa.

h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti, target sebanyak 60 kali dan terealisasi 120 kali dengan capaian kinerja 85,83%. Rapat-rapat tersebut terdiri dari pelaksanaan Perjalanan dinas Dalam Daerah, Dalam Provinsi dan Luar Provinsi.



Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target ssebesar 100% dan realisasi 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

a. Pengadaan Mebel

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah mebel yang diadakan, Target sebanyak 41 unit dan realisasi 41 unit (100%).





b. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan dinas yang diadakan Target sebanyak 4 unit dan realisasi 4 unit

(100%).



c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (100%).

d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah sarana dan prasaran gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan. Dan berdasarkan anggaran kas, pencapaian target kinerja pada 172 unit realisasi 172 unit atau 100%

✚ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 98% dengan persentase



capaian kinerja 98%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan, target sebanyak 400 surat dan terealisasi 2400 surat dengan persentase capaian kinerja 100%. Terdiri dari surat masuk dan surat keluar.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan, target kinerja s.d sebanyak 36 rekening dan realisasi 36 rekening dengan persentase capaian kinerja 100%. terdiri dari Rekening Listrik Kantor, Rujab Ketua, Rujab Wakil Ketua I dan II, Rekening, Mesjid, Air kantor , 3 Rujab, Mesjid rekening, TV Kabel dan Internet kantor, dan Rujab.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan, target sebanyak 21 orang dan realisasi 20 orang (95,24%).

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 97,58% dengan persentase capaian kinerja 97,58%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara, target sebanyak 11 unit dan realisasi 11 unit dengan persentase



capaian kinerja 100%.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, target s.d TW IV TA. 2023 sebanyak 190 unit dan terealisasi 167 unit dengan persentase capaian kinerja 87,89%. Adapun peralatan yang mengalami perbaikan yaitu, Printer, Laptop, AC, dll.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi, target 3 unit dan realisasi 3 unit (100%). Pemeliharaan gedung kantor disesuaikan kondisi gedung kantor yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan. Adapun pemeliharaan yang dilakukan yaitu pengecatan, Plafon, Kamar Mandi kantor, perbaikan pintu toilet.Dll.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlahsarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas, target 3 unit dan realisasi 3 unit (100%). Pemeliharaan Rujab disesuaikan kondisi Rujab Pimpinan yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan. Adapun pemeliharaan yang dilakukan yaitu pengecatan, Plafon, Kamar Mandi Wastafel,Kerang Air, Instalasi Listrik, Jaringan Air perbaikan pintu toilet.Dll.

e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara, target sebanyak 6 unit dan terealisasi 6 unit dengan persentase capaian kinerja 100%. Adapun Aset Tetap Lainnya adalah Asuransi Kendaraan Dinas srbanyak 6 Unit.

 **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**

Indikator kinerja kegiatan adalah Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dengan Formulasi :



Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 82,22% dengan persentase capaian kinerja 82,22%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD yang terbayark, target sebanyak 30 Orang dan terealisasi 30 Orang dengan persentase capaian kinerja 100%.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah pakaian dinas dan atribut anggota DPRD Yang disediakan, target sebanyak 30 Orang dan terealisasi 30 Orang dengan persentase capaian kinerja 100%.

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah anggota DPRD yang Melaksanakan Medical check-Up, target sebanyak 30 Orang dan terealisasi 14 Orang dengan persentase capaian kinerja 46,67%. Disebabkan masih padatnya kegiatan pimpinan dan anggota dewan.



Layanan Administrasi DPRD

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi DPRD , dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang terfasilitasi dengan baik, target sebanyak 2 Kali dan terealisasi 2 Kali dengan persentase capaian kinerja 100%.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga



DPRD

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah tangga DPRD, target sebanyak 3 Unit dan terealisasi 3 Unit dengan persentase capaian kinerja 100%. Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah tangga DPRD.

3.3 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Tabel 23
Target dan Realisasi Belanja Sekretariat DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persen
-1	-2	-3	-4	-5
	BELANJA DAERAH	44.795.897.559	39.875.375.354,70	88,98%
1	Belanja Operasi	38.740.397.559	34.155.966.664	88,17
	Belanja Pegawai	16.477.447.373	15.563.979.053	94,46
	Belanja Barang dan Jasa	22.262.950.186	18.591.987.611	83,51
2	Belanja Modal	6.055.500.000	5.719.408.690,70	94,45
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.924.500.000	3.710.448.546	94,55
	Belanja Gedung dan Bangunan	2.131.000.000	2.008.960.144,70	94,27

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran belanja Sekretariat DPRD pada tahun 2023 sebesar Rp 44.795.897.559. Realisasi sebesar Rp 39.875.375.354,70 atau 88,98 persen yang terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa) dengan total anggaran Rp 38.740.397.559 dan realisasi Rp. 34.155.966.664 atau 88,17 persen dan belanja modal (belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan) dengan total anggaran Rp 6.055.500.000



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022

dan realisasi Rp 5.719.408.690,70 atau 94,45 persen.

Adapun target anggaran pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 dan realisasi dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik. 8
Realisasi Anggaran Triwulan IV TA. 2023

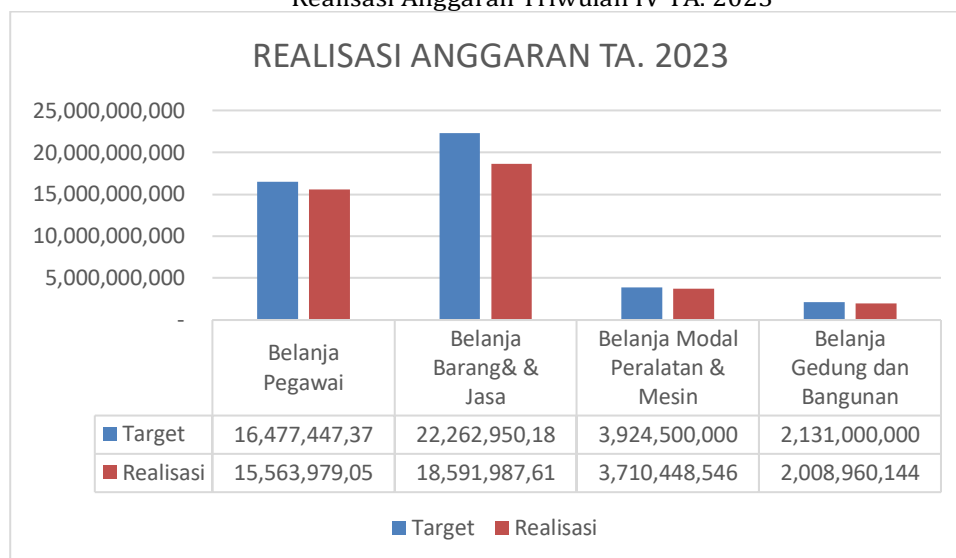
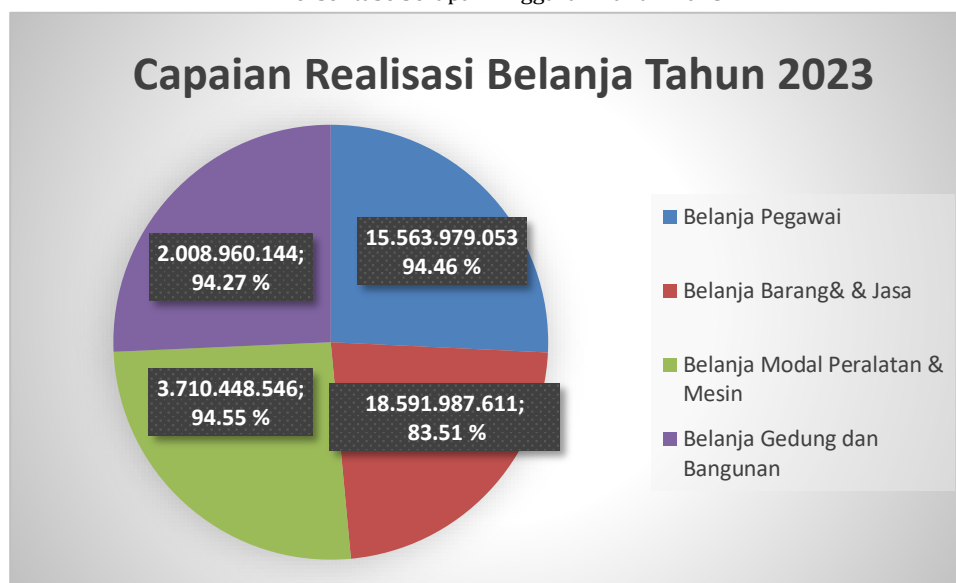


Diagram1
Persentase Serapan Anggaran Tahun 2023



Tabel. 24

Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

No	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN October S.D 31 Desember 2023		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					$(\frac{6}{5} \times 100)$	$(5 - 6)$	$(\frac{8}{5} \times 100)$	$(4 - 6)$	$(\frac{10}{4} \times 100)$
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.609.615.323	29.437.215.769	26.502.724.434,00	90,03	2.934.491.335,00	9,97	2.121.470.889,00	7,42



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.236.700	62.811.650,00	61.289.200	97,58	1.522.450,00	2,42	3.947.500,00	6,05
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.401.800	40.206.350	42.137.500	104,80	1.931.150,00	4,80	264.300,00	0,62
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.053.300	5.973.000	4.378.500	73,30	1.594.500,00	26,70	674.800,00	13,35
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.114.400	5.073.300	4.777.500	94,17	295.800,00	5,83	336.900,00	6,59
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.667.200	11.559.000	9.995.700	86,48	1.563.300,00	13,52	2.671.500,00	21,09
Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	2.705.210.873	3.535.236.369	2.394.252.044	67,73	1.140.984.325,00	32,27	310.958.829,00	11,49
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.602.787.373	3.448.831.569	2.299.426.844	66,67	1.149.404.725,00	33,33	303.360.529,00	11,66
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	102.423.500	86.404.800	94.825.200	109,75	8.420.400,00	9,75	7.598.300,00	7,42
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.315.100	23.315.100,00	22.536.500	96,66	778.600,00	3,34	778.600,00	3,34
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.315.100	23.315.100	22.536.500	96,66	778.600,00	3,34	778.600,00	3,34
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	520.089.550	520.089.550,00	411.597.860	79,14	108.491.690,00	20,86	108.491.690,00	20,86
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	357.725.000	357.725.000	260.714.200	72,88	97.010.800,00	27,12	97.010.800,00	27,12
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	162.364.550	162.364.550	150.883.660	92,93	11.480.890,00	7,07	11.480.890,00	7,07
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.648.227.300	1.648.227.300,00	1.418.015.947	86,03	230.211.353,00	13,97	230.211.353,00	13,97
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	64.655.000	64.655.000	56.954.500	88,09	7.700.500,00	11,91	7.700.500,00	11,91
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.500.000	125.500.000	124.379.800	99,11	1.120.200,00	0,89	1.120.200,00	0,89
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	62.312.000	62.312.000	53.475.000	85,82	8.837.000,00	14,18	8.837.000,00	14,18
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.622.100	106.622.100	105.482.000	98,93	1.140.100,00	1,07	1.140.100,00	1,07
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81.726.800	81.726.800	42.367.200	51,84	39.359.600,00	48,16	39.359.600,00	48,16
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	247.900.000	247.900.000	242.400.000	97,78	5.500.000,00	2,22	5.500.000,00	2,22
Fasilitas Kunjungan Tamu	262.007.000	262.007.000	183.625.900	70,08	78.381.100,00	29,92	78.381.100,00	29,92
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	697.504.400	697.504.400	609.331.547	87,36	88.172.853,00	12,64	88.172.853,00	12,64
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.915.700.000	5.915.700.000,00	5.567.628.991,00	94,12	348.071.009,00	5,88	348.071.009,00	5,88
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.540.700.000	2.540.700.000	2.440.774.100,00	96,07	99.925.900,00	3,93	99.925.900,00	3,93
Pengadaan Mebel	272.000.000	272.000.000	239.250.000,00	87,96	32.750.000,00	12,04	32.750.000,00	12,04
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	2.131.000.000	2.131.000.000	2.008.960.145,00	94,27	122.039.855,00	5,73	122.039.855,00	5,73



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022

Lainnya									
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	972.000.000	972.000.000	878.644.746,00	90,40	93.355.254,00	9,60	93.355.254,00	9,60	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.006.705.800	1.006.705.800,00	843.414.063	83,78	163.291.737,00	16,22	163.291.737,00	16,22	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49.765.800	49.765.800	48.771.900	98,00	993.900,00	2,00	993.900,00	2,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	635.940.000	635.940.000	485.642.163	76,37	150.297.837,00	23,63	150.297.837,00	23,63	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	321.000.000	321.000.000	309.000.000	96,26	12.000.000,00	3,74	12.000.000,00	3,74	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.084.800.000	1.084.800.000,00	865.819.620	79,81	218.980.380,00	20,19	218.980.380,00	20,19	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	239.700.000	239.700.000	158.959.270	66,32	80.740.730,00	33,68	80.740.730,00	33,68	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	170.800.000	170.800.000	129.865.000	76,03	40.935.000,00	23,97	40.935.000,00	23,97	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	54.000.000	54.000.000	50.527.350	93,57	3.472.650,00	6,43	3.472.650,00	6,43	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	294.000.000	294.000.000	227.003.000	77,21	66.997.000,00	22,79	66.997.000,00	22,79	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	326.300.000	326.300.000	299.465.000	91,78	26.835.000,00	8,22	26.835.000,00	8,22	
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	14.266.980.000	14.266.980.000,00	13.559.400.209	95,04	707.579.791,00	4,96	707.579.791,00	4,96	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	13.812.980.000	13.812.980.000	13.202.872.209	95,58	610.107.791,00	4,42	610.107.791,00	4,42	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	274.000.000	274.000.000	272.720.000	99,53	1.280.000,00	0,47	1.280.000,00	0,47	
Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	180.000.000	180.000.000	83.808.000	46,56	96.192.000,00	53,44	96.192.000,00	53,44	
Layanan Administrasi DPRD	1.373.350.000	1.373.350.000,00	1.358.770.000	98,94	14.580.000,00	1,06	14.580.000,00	1,06	
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	114.300.000	114.300.000	99.720.000	87,24	14.580.000,00	12,76	14.580.000,00	12,76	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.259.050.000	1.259.050.000	1.259.050.000	100,00	-	-	-	-	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	16.204.282.236	16.204.282.236,00	13.412.500.921	82,77	2.791.781.315,00	17,23	3.378.715.269,00	20,85	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.284.932.506	2.284.932.506,00	1.873.946.628	82,01	410.985.878,00	17,99	410.985.878,00	17,99	
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	300.678.995	300.678.995	250.466.710	83,30	50.212.285,00	16,70	50.212.285,00	16,70	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.984.253.511	1.984.253.511	1.623.479.918	81,82	360.773.593,00	18,18	360.773.593,00	18,18	
Pembahasan Kebijakan Anggaran	788.058.750	788.058.750,00	647.785.022	82,20	140.273.728,00	17,80	140.273.728,00	17,80	
Pembahasan KUA dan PPAS	59.622.450	59.622.450	59.388.362	99,61	234.088,00	0,39	234.088,00	0,39	



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022

Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	45.866.050	45.866.050	45.483.500	99,17	382.550,00	0,83	382.550,00	0,83
Pembahasan APBD	242.592.300	242.592.300	183.732.960	75,74	58.859.340,00	24,26	58.859.340,00	24,26
Pembahasan APBD Perubahan	254.157.600	254.157.600	173.622.500	68,31	80.535.100,00	31,69	80.535.100,00	31,69
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	185.820.350	185.820.350	185.557.700	99,86	262.650,00	0,14	262.650,00	0,14
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.593.406.916	5.593.406.916,00	4.284.874.373	76,61	1.308.532.543,00	23,39	1.308.532.543,00	23,39
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.729.590.600	1.729.590.600	1.179.956.483	68,22	549.634.117,00	31,78	549.634.117,00	31,78
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.825.964.875	1.825.964.875	1.490.346.880	81,62	335.617.995,00	18,38	335.617.995,00	18,38
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.723.465.900	1.723.465.900	1.304.892.908	75,71	418.572.992,00	24,29	418.572.992,00	24,29
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	168.057.200	168.057.200	164.151.849	97,68	3.905.351,00	2,32	3.905.351,00	2,32
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	146.328.341	146.328.341	145.526.253	99,45	802.088,00	0,55	802.088,00	0,55
Peningkatan Kapasitas DPRD	2.215.593.850	2.215.593.850	1.958.757.005	88,41	256.836.845,00	11,59	256.836.845,00	11,59
Pendalaman Tugas DPRD	1.826.060.850	1.826.060.850	1.621.783.405	88,81	204.277.445,00	11,19	204.277.445,00	11,19
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	133.221.000	133.221.000	82.318.600	61,79	50.902.400,00	38,21	50.902.400,00	38,21
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	252.000.000	252.000.000	252.000.000	100,00	-	-	-	-
Penyusunan Program Kerja DPRD	4.312.000	4.312.000	2.655.000	61,57	1.657.000,00	38,43	1.657.000,00	38,43
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.470.509.130	1.470.509.130	1.393.348.600	94,75	77.160.530,00	5,25	77.160.530,00	5,25
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	18.391.880	18.391.880	17.820.600	96,89	571.280,00	3,11	571.280,00	3,11
Pelaksanaan Reses	1.452.117.250	1.452.117.250	1.375.528.000	94,73	76.589.250,00	5,27	76.589.250,00	5,27
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	37.818.810	37.818.810	34.835.000	92,11	2.983.810,00	7,89	2.983.810,00	7,89
Pengawasan Kode Etik DPRD	37.818.810	37.818.810	34.835.000	92,11	2.983.810,00	7,89	2.983.810,00	7,89
Pembahasan Kerja Sama Daerah	1.202.340.000	1.202.340.000	1.198.263.247	99,66	4.076.753,00	0,34	4.076.753,00	0,34
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1.202.340.000	1.202.340.000	1.198.263.247	99,66	4.076.753,00	0,34	4.076.753,00	0,34
Fasilitasi Tugas DPRD	2.611.622.274	2.611.622.274	2.020.691.046	77,37	590.931.228,00	22,63	590.931.228,00	22,63
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.584.033.500	2.584.033.500	1.997.099.546	77,29	586.933.954,00	22,71	586.933.954,00	22,71
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	27.588.774	27.588.774	23.591.500	85,51	3.997.274,00	14,49	3.997.274,00	14,49
	44.813.897.559	45.641.498.005	39.915.225.355,00	87,45	5.726.272.650,00	12,55	4.898.672.204,00	10,93



❖ **Permasalahan dan Solusi terkait Penyerapan Anggaran**Tabel.25
Permasalahan dan Solusi

Uraian Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
-5	-8	-9
PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Secara Umum Telah di Laksanakan Namun Belum Melakukan Perubahan Target Pada Kegiatan	Akan Melakukan Penyesuain Target Pada Tahun 2024
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Realisasi Kinerja mencapai 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar 86,56 di karenakan sisa anggaran dari belanja fotocopy (sisa Nego)	Melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan dalam perbaikan kinerja dan mengukur hasil yang telah dicapai
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja mencapai 100% dan Realisasi Keuangan 78,91% di karenakan Sisa Anggaran makan minum rapat yang tidak dilaksanakan di karenakan Jadwal rapat yang dilaksanakan bertepatan dengan agenda lain	Melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan dalam perbaikan kinerja dan mengukur hasil yang telah dicapai
Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Anggaran realisasi keuangan tidak mencapai 100 % dikarenakan anggaran tersebut disediakan untuk 1 orang pegawai yang rencana akan pindah ke Sekretariat DPRD	Melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan dalam perbaikan kinerja dan mengukur hasil yang telah dicapai
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Realisasi Kinerja mencapai 100% Akan Tetapi terdapat Sisa Anggaran makan minum rapat yang tidak dilaksanakan di karenakan Jadwal rapat yang dilaksanakan bertepatan dengan agenda lain	Melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan dalam perbaikan kinerja dan mengukur hasil yang telah dicapai



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Secara Umum Telah di Laksanakan Namun Belum Melakukan Perubahan Target Pada Sub Kegiatan	Akan Melakukan Penyesuaian Target Pada Tahun 2024
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Realisasi Keuangan tidak mencapai 100 % dikarenakan adanya belanja jasa tenaga keamanan yang disediakan, karena ajudan tersebut diperbantukan di Sekretariat DPRD sehingga tdk diperbolehkan menerima honorarium/gaji di 2 OPD	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Capaian Kinerja Mencapai 100 % , Realisasi keuangan mencapai 88,09 % dikarenakan adanya Sisa anggaran Belanja Balon/Lampu, kabel pitting dan Baterai yg di peruntukkan untuk Kantor, Masjid, Rujab Pimpinan	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sisa Anggaran Belanja Modal Pengadaan dispenser yang tidak terealisasi dikarenakan anggarannya tidak mencukupi untuk pembelanjaan Dspenser tersebut	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Kinerja mencapai 100 % , Realisasi keuangan mencapai 51,84 % dikarenakan adanya rincian objek belanja yang bersifat disediakan (Belanja Fotocopy)	Akan melakukan Penyesuaian Anggaran sesuaikan dengan kebutuhan di tahun 2024
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Fasilitas Kunjungan Tamu	Realisasi keuangan tidak mencapai 100% di karenakan tamu yang berkunjung tidak memberikan mengirimkan surat kunjungan ke sekretariat DPRD	Sebaiknya satu hari sebeum meakukan kunjungan memberikan informasi atau Mengirim Surat Kunjungan/Konsultasi



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sisa anggaran perjalanan dinas Luar Provinsi yang tidak dilaksanakan seperti : Kunjungan Kerja pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi e-planning, e-budgtring dan pertanggungjawaban keuangan dan BMD yang dilaksanakan di pemkot Malang, DII	Akan melakukan Penyesuaian Anggaran sesuaikan dengan kebutuhan di tahun 2024
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Pengadaan Mebel		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan ini Telah di Laksanakan Namun Belum Melakukan Perubahan Target Pada Sub Kegiatan Sehingga Realisasi Capaian Kinerja tidak mencapai Target.	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pada Kegiatan ini realisasi keuangan hanya mencapai 76,37% karena Pada rek belanja air, listrik dan telepon tagihannya bersifat fariabel, tergantung beban pemakaian operasional kantor dan rujab	Akan melakukan Penyesuaian Anggaran sesuaikan dengan kebutuhan di tahun 2024
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan ini Telah di Laksanakan Namun Belum Melakukan Perubahan Target Pada Sub Kegiatan Sehingga Realisasi Capaian Kinerja tidak mencapai Target.	Akan Melakukan Penyesuain Target Pada Tahun 2024
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	target realisasi keuangan 100% terealisasi hanya 66,32 dikarenakan adanya kendaraan dinas yang rencananya akan melakukan perbaikan, akan tetapi padatnya kegiatan pimpinan sehingga kendaraan tersebut tidak sempat dilakukan perbaikan	Akan memberikan saran ke pimpinan unuk melakukan perbaikan secepatnya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Realisasi Keuangan terealisasi sebesar 76,03 di karenakan adanya rincian objek belanja yang belum terealisasi seperti belanja pemeliharaan Alat kantordan rumah tangga -alat kantor-alat kantor lainnya, belanja pemeliharaan Alat pembersih (mesin Cuci) yang sifat disediakan untuk di Rujab Pimpinan, belanja pemeliharaan komputer dan printer	Akan memberikan saran ke pimpinan unuk melakukan perbaikan secepatnya
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD tidak Mencapai Target dikarenakan adanya Sub kegiatan yang tidak mencapai target (Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD)	Pada tahun 2023 akan dilakukan penentuan jadwal medical check-up lebih awal dari tahun 2024 sehingga dapat mengakomodir jadwal Mcu anggota DPRD dengan agenda kegiatannya.
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Pada Sub Kegiatan Capaian kinerja terealisasi 100% dan Realisasi Keuangan 95,58. Masih Terdapat sisa Anggaran dikarenakan adanya rician objek belanja yang sifatnya di sediakan seperti belanja tunjangan kesejahteraan (Uang Jasa Pengabdian dan belanja jasa kematian)	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		
Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Jumlah Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Melakukan Medical Chek-UP Target 30 Orang Realisasi 14 orang 46,67% dikarenakan masih padatnya kegiatan pimpinan dan anggota dewan	Akan selalu mengingatkan pimpinan dan anggota dewan untuk MCU
Layanan Administrasi DPRD		
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Secara Umum Telah di Laksanakan Namun Belum Melakukan Perubahan Target Pada Kegiatan	Akan Melakukan Penyesuaian Target Pada Tahun 2024
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	pada Kegiatan Pembentukan Peraturan ranperda tidak mencapai target dikarenakan Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Pembahasan Ranperda penentuan target pada anggaran pokok tinggi dan pada saat perubahan anggaran tidak melakukan pengurangan target	
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Ada 2 buah Ranperda di TW IV yaitu Ranperda Zonasi Nilai Jual Harga Tanah, namun dikembalikan oleh pihak eksekutif/tidak dibahas lagi dan Ranperda Penyesuaian Kecamatan Kalaena dan Kecamatan Angkona, namun belum dibahas dengan adanya moratorium pemutakhiran data kode wilayah sesuai surat edaran Mendagri (Terjadwal di Propemperda Tahun 2024 Tahap III)	Terdapat Ranperda yang tertunda proses kajian nya di tahun 2023, yaitu : Ranperda Penyesuaian Kecamatan Kalaena dan Kecamatan Angkona. Selanjutnya akan diproses di tahun 2024 (sesuai SK Propemperda Tahun 2024)
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Ada 2 buah Ranperda di TW IV yaitu Ranperda Zonasi Nilai Jual Harga Tanah, namun dikembalikan oleh pihak eksekutif/tidak dibahas lagi dan Ranperda Penyesuaian Kecamatan Kalaena dan Kecamatan Angkona, namun belum dibahas dengan adanya moratorium pemutakhiran data kode wilayah sesuai surat edaran Mendagri (Terjadwal di Propemperda Tahun 2024 Tahap III)	Terdapat Ranperda yang tertunda proses pembahasannya di tahun 2023, yaitu : Ranperda Penyesuaian Kecamatan Kalaena dan Kecamatan Angkona. Selanjutnya akan diproses di tahun 2024 (sesuai SK Propemperda Tahun 2024)



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022

Pembahasan Kebijakan Anggaran		
Pembahasan KUA dan PPAS		
Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS		
Pembahasan APBD	Capaian Realisasi Kinerja mencapai 100 % akan tetapi realisasi keuangan hanya 75,74 % di karenakan Sisa Anggaran perjanan Dinas (Fasilitasi kebiro terbatas)	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.
Pembahasan APBD Perubahan	Capaian Realisasi Kinerja mencapai 100 % akan tetapi realisasi keuangan hanya 75,74 % di karenakan Sisa Anggaran perjanan Dinas (Fasilitasi kebiro terbatas)	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sub Kegiatan ini terlaksana tetapi beberapa kegiatan yang bertepatan dengan beberapa jadwal badan musyawarah DPRD terdapat kegiatan bertepatan waktunya dengan kegiatan lain, sehingga Dewan akan memilih kegiatan mana yang akan diikuti. Terkadang juga ada beberapa dewan yang tidak mengikuti kegiatan tersebut berhubung ada kegiatan lain yang harus diikuti. Jadwal Bamus DPRD bertepatan dengan kegiatan lain sehingga anggota DPRD tdk dapat mengikuti kegiatan tersebut.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.
Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Infrastruktur	Sub Kegiatan ini terlaksana tetapi beberapa kegiatan yang bertepatan dengan beberapa jadwal badan musyawarah DPRD terdapat kegiatan bertepatan waktunya dengan kegiatan lain, sehingga Dewan akan memilih kegiatan mana yang akan diikuti. Terkadang juga ada beberapa dewan yang tidak mengikuti kegiatan tersebut berhubung ada kegiatan lain yang harus diikuti. Jadwal Bamus DPRD bertepatan dengan kegiatan lain sehingga anggota DPRD tdk dapat mengikuti kegiatan tersebut.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.
Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian	Capaian Realisasi kinerja 100% dan realisasi Keuangan 75,71% dikarenakan Sisa Anggaran Perjalanan Dimnas (Jadwal Bamus DPRD bertepatan dengan kegiatan lain sehingga anggota DPRD tdk dapat mengikuti kegiatan tersebut)	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022

Peningkatan Kapasitas DPRD		
Pendalaman Tugas DPRD	Capaian Realisasi Kinerja 100% dan Realisasi Keuangan 88,81% , sisa Anggaran bimtek yg akan dilaksanakan d luar prov. tdk dapat mengcover biaya perjalan bimtek tersebut.di Sebabkan Oleh Adanya penembahan bimtek yang dilaksanakan oleh Partai politik	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Capaian Realisasi Kineja mencapai 100 % dan Realisasi keuanga tidak mencapai 100% dikarenakan sub kegiatan tersebut disediakan untuk kebutuhan alat kelengkapan DPRD (Tenaga Ahli)	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		
Penyusunan Program Kerja DPRD	Capaian Realisasi Kinerja 100% dan Realisasi Keuangan hanya 61,57 % dikarenakan sisa anggaran Makan Minum Rapat	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kegiatan ini Telah di Laksanakan Namun Belum Melakukan Perubahan Target Pada Sub Kegiatan Sehingga Realisasi Capaian Kinerja tidak mencapai Target.	Akan Melakukan Penyesuain Target Pada Tahun 2024
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		
Pelaksanaan Reses		
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kegiatan ini Telah di Laksanakan Namun Belum Melakukan Perubahan Target Pada Sub Kegiatan Sehingga Realisasi Capaian Kinerja tidak mencapai Target.	Akan Melakukan Penyesuain Target Pada Tahun 2024
Pengawasan Kode Etik DPRD		
Pembahasan Kerja Sama Daerah		
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		
Fasilitasi Tugas DPRD	Kegiatan ini Telah di Laksanakan Namun Belum Melakukan Perubahan Target Pada Sub Kegiatan Sehingga Realisasi Capaian Kinerja tidak mencapai Target.	Akan Melakukan Penyesuain Target Pada Tahun 2024
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Konsultasi Pelasanaan Tugas DPRD Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dengan Target 100 Dokumen dan terealisasi 64 Dokumen Atau sebesar 64 % dikarenakan untuk perjalanan Pimpinan disediakan Apabila ada undangan pimpinan pada saat mengikuti Rakor	Akan Membuat Buku Kontrol terkait Pimpinan Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		



4. Analisa Penyebab Peningkatan dan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

a. Faktor Penyebab Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen yang kuat dari seluruh *stakeholder* untuk memfokuskan sumber-sumber daya dan dana dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam tahun 2023.

b. Faktor Penyebab Kegagalan Pencapaian Sasaran

Berdasarkan hasil pencapaian sasaran dari level sub kegiatan, kegiatan sampai program di tahun 2023 ini tidak ada yang dianggap gagal hanya saja pencapaiannya di bawah 80 persen ini disebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan yang terlibat dalam proses pencapaian kinerja dan pengambil keputusan dalam proses-proses perencanaan dan penganggaran yang kurang tepat.

c. Hambatan/Masalah yang Dihadapi Dalam Pencapaian Sasaran

- 1) Keterbatasan jumlah aparatur yang ada di Sekretariat DPRD antara lain pada tingkat staf pengelola kegiatan dan petugas teknis sehingga data yang diperlukan belum optimal.
- 2) Pengolahan data dan informasi pada lingkup bidang yang belum maksimal.
- 3) Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi

d. Strategi/Alternatif Solusi Yang Dilakukan untuk Memecahkan Masalah

- 1) Dengan keterbatasan jumlah aparatur Pada Lingkup Sekretariat DPRD, maka alternatif solusi yang dilaksanakan adalah dengan mengoptimalkan tenaga



dan sumber daya manusia yang ada pada Lingkup Sekretariat DPRD, disamping itu mengusulkan untuk penambahan tenaga Aparatur.

- 2) Memaksimalkan pengolahan data dan informasi lingkup OPD
- 3) Mencermati /kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengatisipasi SILPA program diakhir tahun.

5. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Perbaikan-Perbaikan Tahun Lalu

Tidak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lakip) pada tahun 2023 di tuangkan dalam matris tindak lanjut sebagai berikut :

Tabel 27
Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LAKIP Sekretariat DPRD
Tahun 2022

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tidak Lanjut	Status/progres penyelesaian
1	Memonitor pencapaian target jangka menengah dan terdapat pejabat/staf yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan memonitor kinerja secara periodik dan selanjutnya hasil monitoring di tindak lanjuti;	Telah melakukan monitoring pencapaian target secara priodik dan telah menunjuk Pejabat/staf untuk melaporkan dan memonitoring kinerja secara periodik	Telah membuat SK Pejabat/Staf untuk melaporkan dan memonitoring kinerja secara periodik
2	Memanfaatkan Capaian Kinerja dan Monitoring Rencana Aksi; <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan (reward). • Capaian target kinerja dijadikan dasar untuk memilih dan memilah yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkinerja. • Capaian target kinerja digunakan sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat (baik,cukup,kurang,tercapai, tidak tercapai berhasil, gagal, dll) suatu kondisi atau keadaan 	Telah memanfaatkan Capaian Kinerja dan monitoring rencana aksi sebagai dasar untuk memilih dan memilah yang ASN yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkinerja sedangkan dalam pemberian penghargaan (reward)	pemberian penghargaan (reward) hanya sebatas ucapan belum berbentuk tulis atau lain untuk tahun ini akan dibuat semacam piagam



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022

3	Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berjenjang sampai pada staf sesuai SOP dan hasil pengukuran kinerja dijadikan dasar pemberian reward dan Punishment.	Telah Melakukan Pengukuran kinerja secara berjenjang dengan peningkatan kualitas pengukuran kinerja berkala tidak terbatas pada realisasi keuangan dan fisik sebagai dasar pemberian reward dan punishment;	Telah melakukan peningkatan kualitas pada PK (pejabat struktural) dan SKP (kinerja individu).
4	Memanfaatkan Informasi perbandingan pada tingkat Provinsi Nasional yang disajikan dalam Laporan Kinerja menyajikan informasi efisiensi sumberdaya terkait pencapaian sasaran.	Laporan Kinerja telah menyajikan informasi efisiensi sumberdaya terkait pencapaian sasaran.	Telah disajikan dalam lakip thn 2023 efisiensi
5	Memanfaatkan Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja untuk peningkatan kinerja	Telah memanfaatkan Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja untuk peningkatan kinerja	Telah dilakukan Evaluasi Internal setiap Triwulan
6	Setiap Evaluasi program/kegiatan dan rencana aksi menghasilkan rekomendasi dalam rangka perbaikan kinerja kedepannya.	Setiap Evaluasi program/kegiatan dan rencana aksi menghasilkan rekomendasi dalam rangka perbaikan kinerja kedepannya.	Telah dilakukan Evaluasi Internal setiap Triwulan
7	Memanfaatkan hasil evaluasi program/rencana aksi dengan menindaklanjuti rekomendasirekomendasi evaluasi program/rencana aksi dan tindak lanjut tertuang dalam evaluasi evaluasi program/rencana aksi triwulan berikutnya.	Telah memanfaatkan hasil evaluasi program/rencana aksi dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi evaluasi program/rencana aksi dan tindak lanjut tertuang dalam evaluasi-evaluasi program/rencana aksi triwulan berikutnya	Telah dilakukan Evaluasi Internal setiap Triwulan



4

BAB 4 PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pencapaian kinerja tahunan yang diukur berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari uraian yang telah dipaparkan dalam LAKIP Tahun 2023 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 untuk semua sasaran strategis berikut indikator kinerjanya secara umum cukup bagus. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kontribusi dari *stakeholder* secara keseluruhan untuk Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi dari semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Dilihat dari sisi pencapaian akuntabilitas keuangan dalam hal ini, tingkat realisasi keuangan tahun 2023 untuk mendukung semua sasaran tercapai dengan baik, dimana tingkat realisasi belanja sebesar 88,89 persen. Dukungan keuangan/pendanaan dari APBD dan APBD Perubahan Tahun 2023 sangat membantu untuk mengoptimalkan pencapaian seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Evaluasi perbandingan pencapaian sasaran/indikator selama tahun 2021-2026 terhadap target sasaran/indikator kinerja RENSTRA selama 5 (lima) tahun (2021-2023) secara umum tercapai sangat baik dan proporsional serta diharapkan. Namun demikian terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain penetapan program dan kebutuhan prioritas yang terkadang tidak



berkesesuaian dengan kesiapan anggaran, Sehingga tidak ter *up date*.

IV.2 SARAN

1. Melakukan perencanaan dengan memperhatikan prioritas utama program dan kebutuhan Sekretariat DPRD.
2. Mengusulkan penambahan aparatur untuk meningkatkan kinerja organisasi Sekretariat DPRD antara lain staf.
3. Perlu dilakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi tentang teknis dan peningkatan SDM.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, dapat dijadikan sebagai umpan balik dan acuan perencanaan tahun berikutnya, sebagaimana fungsi pokok dan tujuan dari penyusunan LAKIP.

Malili, 02 Januari 2023

SEKRETARS DPRD


ASWAN AZIS S.Pi, M.Si
Pembina Tk I
NIP. :197/60316 200803 1 001



**L
A
M
P
I
R
A
N**

